

PERAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA (DINAS PMD)
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DESA**

Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si.

Firda Zulfa Fahriani, M.Sy

Muhammad Alhada Fuadilah Habib, S. Sosio., M.A.



**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS
PMD) KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DESA**

Copyright © Binti Nur Asiyah, Firda Zulfa Fahriani, &
Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 2021
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Layouter: Muhamad Safi'i
Desain cover: Dicky M. Fauzi
Penyelaras akhir: Saiful Mustofa
vi + 123 hlm: 14 x 21cm
Cetakan: Pertama, September 2021
ISBN: 978-623-6364-27-7

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memplagiasi atau
memperbanyak seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:
Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
Telp: 081216178398
Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com
Website: www.akademiapustaka.com

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada para penulis sehingga buku yang berjudul “*Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa*” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini sebagai wujud kebijakan dinas PMD untuk meningkatkan literasi tentang pemberdayaan kepada masyarakat bagi pelaku pemberdayaan, Pemerintahan Desa, BUM Desa, dan stakeholders terkait.

Dinas PMD dalam menjalankan pemberdayaan kepada masyarakat didasarkan atas master plan yang dibuat dengan menitikberatkan pada 9 poin kebijakan Dinas PMD Tulungagung. Kebijakan dinas PMD yang tertuang dalam perencanaan tersebut antara lain 1). Mapping BUM Desa. 2) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 3) Peningkatan Kapasitas BUM Desa. 4) Pengembangan unit usaha BUM Desa. 5) Memfasilitasi Forum BUM Desa Kecamatan dan Kabupaten. 6) Fasilitasi Permodalan melalui optimalisasi dana. 7) Klinik BUM Desa. 8) Fasilitasi aplikasi SIA BUM Desa. 9) *Market place* BUM Desa.

Buku ini disusun dan dianalisis dari hasil kerja Dinas PMD untuk memberikan pemaknaan sehingga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilaksanakan di masyarakat Desa. Pemberdayaan kepada masyarakat desa melalui komunitas yaitu BUM Desa dikembangkan untuk membangun perekonomian desa dan masyarakat. Anggaran pemerintah telah disalurkan melalui Desa, maka diperlukan partner untuk mengembangkan desa agar desa memiliki pendapatan. Ke depan diharapkan ada kemandirian dari desa untuk mensejahterakan masyarakatnya agar masyarakat desa mandiri dan berdaya saing.

Buku ini juga menunjukkan peran Dinas secara proaktif untuk memberikan sinergi, kolaborasi antara pemerintah Desa, Pemerintah daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat agar ada program-program berkelanjutan yang mampu dikembangkan di Desa secara bersama-sama. Hal ini memberikan sumbangsih dalam mendorong keberhasilan BUM Desa dalam memberikan pendapatan asli desa sebesar 227 juta selama empat tahun berjalan (2017-2020).

Buku ini juga menunjukkan bahwa dinas PMD senantiasa adaptasi terhadap perkembangan teknologi dengan menyediakan fasilitas online berupa website pasar desa online Tulungagung. Website ini memberikan ruang bagi produk unggulan BUM Desa dan masyarakat untuk bisa dipasarkan di pasar deso agar dikenal lebih luas oleh masyarakat.

BUM Desa memiliki bidang kerja yang cukup luas dalam peranannya untuk mengembangkan ekonomi desa. Melalui inisiasi dan penguatan Dinas PMD, BUM Desa telah berhasil mewujudkan wisata desa yang bermanfaat bagi edukasi di masyarakat, ruang bertemunya hasil usaha masyarakat dan juga memberikan wahana rekreasi yang dapat menyehatkan mental masyarakat dari kesibukan kerja pada setiap harinya.

Demikian disampaikan, semoga dengan hadirnya buku yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa” memberikan banyak inspirasi terhadap para pihak terkait untuk mengembangkan ekonomi di Desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Tulungagung, 9 Agustus 2021
Kepala Dinas PMD Tulungagung
Drs. Eko Asistono, M.Si.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	11
BAB III METODOLOGI.....	39
BAB IV MASTER PLAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PMD TULUNGAGUNG.....	47
BAB V PEMBERDAYAAN SEKTOR USAHA MASYARAKAT DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA.....	51
BAB VI ANALISIS PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA.....	67
BAB VII ANALISIS PEMBERDAYAAN PASAR DESO TULUNGAGUNG UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN USAHA MASYARAKAT.....	83
BAB VIII ANALISIS PEMBERDAYAAN SEKTOR WISATA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA... 	103
BAB IX PENUTUP.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020. Menurut data tersebut, persentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Disebutkan, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. (Kompas.com, 2021)

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang dimiliki oleh setiap negara. Hampir semua negara di belahan dunia ini menjadikan kemiskinan adalah satu prioritas yang harus dicarikan solusinya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan dan kemiskinan desa. Hal yang dilakukan adalah pendampingan dana desa melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan desa. Hadirnya BUM Desa merupakan upaya menjadikan putaran ekonomi di desa. BUM Desa menjadi mediator pengembangan usaha masyarakat desa agar dikenal lebih luas.

Di dalam Islam sendiri, kemiskinan adalah salah satu hal yang memang harus segera ditangani. Mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Na'im bahwa "Kemiskinan

dekat dengan kekufuran”. Dalam hadis tersebut jelas tersurat bahwa, salah satu penyebab dari kekufuran adalah kemiskinan yang diderita makhlukNya. Orang-orang miskin harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kemiskinannya. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Dalam hal ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan melakukan usaha pemberdayaan bagi masyarakat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1999) ‘pemberdayaan’ berasal dari kata ‘daya. Arti daya adalah kekuatan atau tenaga, misalnya: daya pikir, daya batin, daya gaib, daya gerak, daya usaha, daya hidup, daya tahan, sudah tak ada dayanya lagi. Daya juga berarti pengaruh, misalnya: Tidak sedikit daya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka. Arti lain dari kata daya adalah akal, jalan (cara, ikhtiar), misalnya: apa daya, seribu daya, bermacam-macam daya, habis segala daya untuk mengatasi kesulitan itu (Bahri, 2019).

B. Nama Kegiatan

Nama kegiatan yang dijalankan oleh dinas PMD adalah Pemberdayaan kepada Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menguatkan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi semangat untuk mensejahterakan masyarakat. Karena daerah yang rendah tingkat kemiskinannya, dapat menjadi indikator tingkat kemajuan daerah tersebut. Tulungagung adalah satu daerah di wilayah selatan provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 di Kabupaten Tulungagung angka kemiskinan sebesar 8,23% pada dan pada tahun 2017 turun menjadi 8,04%. (Tulungagung, 2018). Hal tersebut menjadi salah satu dorongan pemerintah untuk tetap dan terus bergerak melalui berbagai upaya dan inovasi untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu,

diantaranya Pengembangan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI), Pemberian Bantuan Iuran Daerah (PBID), Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Perluasan & Penguatan Pelatihan Kerja pada BLK, Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu, Pembangunan MCK bagi Warga Miskin, serta Pengembangan Koperasi Wanita. (Tulungagung, 2018). Selain upaya yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Kabupaten Tulungagung *concern* dalam hal melakukan Pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Perekonomian Desa.

Dalam konsep teoritisnya, Pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah yang dilakukan secara bertahap. Tujuan adanya tahapan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyiapkan diri untuk mengelola aktivitas pemberdayaan. Pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008:1-7) adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. (Bahri, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi, 2013).

Pertama, penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “*demand*”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).

Kedua, pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut “*capacity building*”, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Kita tidak asing dengan konsep ini karena sudah amat sering melakukan pelatihan, workshop, seminar, dan sejenisnya.

Arti dasarnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan akan diberikan. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Misalnya sebelum diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pengkapasitasan organisasi ini seringkali abai, pada maknanya ibarat “menyiapkan medium sebelum meletakkan objeknya”; sama halnya sebelum kita menanam bibit jagung, kita siapkan pula lahannya.

Pengkapasitasan selanjutnya adalah sistem nilai. Setelah orang dan wadahnya ditingkatkan kapasitasnya, maka sistem nilai juga perlu ditingkatkan. Sistem nilai adalah “aturan main”. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan BUM Desadan sejenisnya. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika dan *Good Corporate Governance*. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan membuatkan “aturan main” diantara mereka sendiri. (Bahri, 2019)

Ketiga, pemberian daya atau “*empowerment*”. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pokok gagasannya adalah bahwa proses

pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima. Pemberian kredit kepada kelompok miskin yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuannya mengelola usaha. Jika perputaran usahanya hanya mampu mencapai lima juta rupiah, tidaklah bijaksana jika diberikan pinjaman atau modal sebesar lima puluh juta rupiah.

Tahapan pelaksanaan pemberdayaan model kedua adalah menurut Subejo dan Supriyanto (2004) dalam (Bahri, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi, 2013, hal. 33-36), yaitu: dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan kemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahapan diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, Seleksi Lokasi/Wilayah Seleksi desa atau dusun dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak – pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin.

Kedua, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (PM). Kegiatan ini untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi PM membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam program. *Ketiga*, Proses Pemberdayaan Masyarakat. Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum).

C. Tujuan Kegiatan

Dinas PMD Tulungagung menjalankan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat berdikari, mampu menciptakan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam

meningkatkan taraf hidupnya, di mana tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Kegiatan

Pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas PMD ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan menjadi salah satu indikator suksesnya suatu kepemimpinan daerah dan ketercapaian pertumbuhan ekonomi negara.

E. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pemberdayaan masyarakat oleh dinas PMD Tulungagung dilaksanakan sepanjang tahun 2020 hingga Januari 2021.

F. Pelaksana Kegiatan

Tim pelaksana pemberdayaan masyarakat kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Ekonomi dan Lingkungan Dinas PMD Kabupaten Tulungagung sebagaimana tugas dan fungsinya.

G. Sumber Dana

Sumber pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dinas PMD berasal dari sinergi pusat, daerah dan APBD Tulungagung.

H. Sistematika Penulisan

Buku ini disusun berdasar sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat pendahuluan, nama kegiatan, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, Waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan, Sumber dana dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoritis, memuat konsep pemberdayaan masyarakat, Teori *Asset Based Community Development* (ABCD), teori stakeholders, Peningkatan ekonomi

masyarakat, Tipologi desa dan kelurahan, Studi terdahulu, kerangka konseptual.

Bab III Metodologi, memuat Pendekatan dan jenis pemberdayaan, Lokasi Pemberdayaan, *Asset Based Community Development*, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data, Pengecekan keabsahan temuan.

Bab IV Master plan pemberdayaan masyarakat Dinas PMD Tulungagung.

Bab V Pemberdayaan Sektor Usaha Masyarakat Desa untuk meningkatkan perekonomian desa yang terdiri dari pendahuluan, bentuk pemberdayaan dinas PMD, Peningkatan ekonomi desa dari sektor usaha masyarakat, Analisis peningkatan ekonomi desa dan tindak lanjut.

Bab VI Analisis Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan ekonomi desa memuat; pendahuluan, Badan Usaha Milik Desa, Bentuk Pemberdayaan dinas PMD, Peningkatan Ekonomi desa melalui BUM Desa, Analisis peningkatan pendapatan asli Desa dan tindak lanjut.

Bab VII. Analisis Pasar Deso Tulungagung untuk meningkatkan penjualan Usaha Masyarakat memuat; pendahuluan, Pasar Deso Tulungagung, Peningkatan ekonomi desa melalui pasar deso Tulungagung, Analisis ekonomi desa dan tindak lanjut.

Bab VIII. Analisis Pemberdayaan Sektor Wisata Desa untuk Meningkatkan perekonomian Desa memuat pendahuluan, Sektor wisata desa, Bentuk pemberdayaan dinas PMD pada sektor wisata BUM Desa, Peningkatan Ekonomi Desa dari sektor Wisata Desa, analisis peningkatan ekonomi desa dan tindak lanjutnya.

Bab IX Penutup.

I. Daftar Pustaka

- Arnani, M. (2021, Februari 18). *Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi* . Retrieved from Kompas.com:
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* . Kediri : FAM Publishing .
- Bappeda Kab Tulungagung. (2018, Mei 10). *Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*. Retrieved from Bappeda Kabupaten Tulungagung:
<http://bappeda.tulungagung.go.id/detailpost/koordinasi-penanggulangan-kemiskinan#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Sosial%20tahun,turun%20menjadi%208%20C04%25>.
- Kompas, (2021, Februari 18). *Kompas.com* . Retrieved from Kompas.com:
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>
- Poerwadarminta, W. (1999). *Kamus umum bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka .
- Sayifullah, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten . *JEQu Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* , 236.
- Sosial, D. K. (2020, Desember 7). *Profil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* . Retrieved from Data Terpadu Kesejahteraan Sosial:
<https://dtks.kemensos.go.id/sejarah-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks>

Tulungagung, D. (2019). *DPMD Tulungagung* . Retrieved
from DPMD Tulungagung:
<http://dpmd.tulungagung.go.id/profil/>

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung memiliki berbagai jenis bidang usaha, mulai dari sektor perdagangan hingga pariwisata. Adapun kelompok masyarakat yang diberdayakan (dalam hal ini adalah BUM Desa) juga memiliki karakteristik yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Perbedaan ini dikarenakan tiap-tiap desa memiliki karakteristik atau potensi masyarakat yang berbeda. Ada masyarakat yang sudah memiliki pemikiran terbuka (*open minded*) sehingga mudah untuk menerima inovasi-inovasi sektor usaha baru, ada juga masyarakat yang masih tradisional sehingga susah menerima inovasi. Selain potensi sumber daya manusia yang berbeda, tiap wilayah juga memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang berbeda.

Perbedaan karakteristik masyarakat ini, menuntut Dinas PMD Kabupaten Tulungagung untuk memberikan pendekatan / metode yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat di masing-masing wilayah. Tiap-tiap pendekatan / metode pemberdayaan yang dipilih, perlu memiliki landasar teoritis yang jelas agar program pemberdayaan masyarakat bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori pemberdayaan masyarakat yang digunakan sebagai pendekatan yang dipilih untuk memberdayakan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan masyarakat” cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing

lagi di telinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi sosial/kemasyarakatan, maupun oleh pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat/dengar mulai dari koran, radio, televisi, bahkan internet. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal, umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan (Hamid, 2018).

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009). Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan) (Alfitri, 2011).

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Kemudian masyarakat diharapkan juga akan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010).

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).

B. Teori ABCD (Asset Based Community Development)

Salah satu model pendekatan yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung untuk pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*). ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. (Maulana, 2019). Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai sebuah aset yang berharga bagi desa. Komunitas masyarakat yang ada di desa, misalnya BUM Desa, Ibu-Ibu PKK, Kelompok Tani, atau kelompok remaja, merupakan aset desa yang

sangat berharga. Berbagai kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat keterampilan atau potensinya kemudian diberikan wadah untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat bernilai sosial maupun ekonomis.

Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini, merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan asset lokal sebagai penekanannya. Adapun yang dimaksud “asset” dalam konteks ini adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri (Fitriawan, 2020). Masyarakat dapat menggunakan potensi atau kekayaan yang dimiliki, sebagai senjata pamungkas untuk melakukan program pemberdayaan. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat, misalnya kecerdasan, kreativitas, kepedulian, gotong royong, dan solidaritas. Kemudian bisa juga berupa ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti bentang alam yang indah, ladang yang subur, pantai yang menghasilkan banyak ikan, atau sungai yang menghasilkan pasir.

Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada asset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Asset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan dilakukan (Fithriyana, 2020). Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini, akan mampu memberikan kesempatan kepada mitra (masyarakat yang diberdayakan) untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya sendiri, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat mitra (Alhamuddin, Aziz, Inten, & Mulyani, 2020).

Dalam pendekatan ABCD, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apa-apa, namun masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang

sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup (sosi-ekonomi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya masyarakat yang belum berdaya disebabkan karena ketiadaan akses untuk memaksimalkan potensi yang telah mereka miliki, atau karena masih terbatasnya sistem sumber daya yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi mereka.

Dalam suatu pemberdayaan, diperlukan adanya fasilitator yang berperan untuk mengidentifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat. Disamping itu, fasilitator juga berperan dalam menghubungkan potensi yang ada dalam masyarakat dengan sistem atau model pemberdayaan yang tepat. Dalam hal ini, fasilitator juga bisa membantu untuk menghubungkan ke berbagai lembaga/badan/keompok lain yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat mitra dengan jaringan yang lebih luas (Rahman, 2018).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan yaitu *Problem Based Approach*, *Need Based Approach*, *Right Based Approach*, dan *Asset Based Approach* (Widjajanti, 2011). *Problem Based Approach* merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat setempat akan melakukan perubahan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Dengan demikian, aspek “kesadaran akan masalah” ini, merupakan aspek yang sangat penting karena tanpa adanya kesadaran, masyarakat tidak akan berusaha berubah dari kondisi permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapi.

Aspek *Need Based Approach* merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Kebutuhan dasar merupakan hal yang sangat penting dan

harus terpenuhi terlebih dahulu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup, kenyamanan dan kesejahteraan. Kebutuhan anggota masyarakat berupa tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan, merupakan hal yang harus ada pada tiap-tiap anggota masyarakat sebagai wujud tercukupinya kebutuhan dasar. Aspek ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum masyarakat diberdayakan untuk melakukan sebuah perubahan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan sangat susah untuk diberikan inovasi-inovasi pemberdayaan sebelum terpenuhinya kebutuhan dasar terlebih dahulu.

Aspek *Right Based Approach*, merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan (materi) untuk pemberdayaan masyarakat. Prinsip aspek ini adalah menggunakan bantuan modal (dana awal) untuk memulai melakukan sebuah usaha perubahan menuju kemandirian. Pemberian modal ini digunakan untuk menunjang kegiatan dalam proses pemberdayaan. Aspek ini cukup penting karena untuk berjalannya sebuah program di awal-awal, butuh dana operasional agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan sesuai rencana. Terkadang dana awal ini juga sangat diperlukan untuk kondisi-kondisi yang mendesak, seperlu kerusakan sarana dan prasarana maupun kecelakaan yang membutuhkan dana untuk perbaikan.

Aspek *Aset Based Approach*, merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi yang dimaksud di sini seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat setempat. Beberapa potensi inilah yang merupakan aset besar dan sangat berharga dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui rasa kebersamaan, kerukunan dan solidaritas dalam diri masyarakat, diharapkan dapat memunculkan kecerdasan, kepekaan sosial, sehingga masyarakat dapat dengan mudah bekerja sama dengan solid dan mampu

menciptakan inovasi-inovasi produk usaha baru baru yang mengagumkan.

Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam pemberdayaan masyarakat yaitu aspek Sumber Daya Alam (SDA). Kekayaan alam merupakan aspek terbesar dalam menunjang keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. Aspek SDA ini sebenarnya merupakan aspek eksternal dalam kaitannya dengan pendekatan ABCD. Hal ini dikarenakan kekayaan alam atau SDA merupakan hal kodratiah (alamiah) yang diberikan oleh Tuhan untuk dilestarikan masyarakat tertentu saja. Adapun beberapa kekayaan alam tersebut seperti kondisi tanah yang subur untuk pertanian, perkebunan, kondisi alam yang rindang, hutan yang subur, lautan atau pantai yang indah dan sebagainya (Suardi, Mallongi, & Baharuddin, 2019)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) merupakan sebuah pendekatan yang menjadikan potensi setempat sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah masyarakat. Melalui pendekatan ini, secara berkelanjutan dapat membentuk kemandirian, kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCB ini diantaranya adalah, sumber daya manusia, institusi/assosiasi/organisasi, sumber daya alam, finansial/ekonomi, *opportunity*, dan kondisi sosial masyarakat setempat (Riyanti & Raharjo, 2021).

C. Teori Stakeholder

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Peranan para pemangku kepentingan tersebut, tentu saja tidak bisa dilakukan secara terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama.

Secara konseptual, *stakeholder* dapat didefinisikan sebagai orang/kelompok yang memiliki keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu (Wahyu, Golar, & Massiri, 2019). Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Hal utama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya* (Nur & Priantinah, 2012).

Asumsi dasar dari teori *stakeholder* menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antar *stakeholder*, maka akan semakin baik hasil dari pemberdayaan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin buruk hubungan antar *stakeholder* maka akan semakin sulit mencapai keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hubungan yang kuat antar pemangku kepentingan ini didasarkan pada nilai kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* merupakan sebuah konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan

memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal guna mencapai kerjasama yang baik (Mardikanto, 2014).

Dalam proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat, harus benar-benar dijalankan secara terpadu, antara fasilitator beserta seluruh *stakeholder* (termasuk masyarakat penerima manfaat). Tahapan perencanaan ini merupakan tahap yang sangat penting yang akan menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan ini akan diketahui masalah-masalah sesungguhnya yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian, seluruh hasil kesepakatan hendaknya dibuat secara tertulis sehingga akan menjadi acuan dalam bekerja, serta menghindari terjadinya saling menyalahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Prinsip dasar dan paling utama, yang harus selalu diingat dan diimplementasikan oleh para *stakeholder* dalam penyusunan suatu perencanaan program pemberdayaan masyarakat, adalah harus bersifat partisipatif (*bottom up*) (Hamid, 2018).

Keterlibatan *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi. Kolaborasi merupakan cara atau metode untuk menciptakan suatu keadaan dimana dua pihak atau lebih saling berkontribusi dalam tiap-tiap tahap pencapaian tujuan bersama, adapun unsur-unsurnya meliputi *Resources, Organization, dan Norms* (Salman, 2012). Adapun keterlibatan *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari tiga tahapan, yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan (Wrihatnolo, 2007).

Analisis keterlibatan *stakeholders* dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tulungagung selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kontribusi yang diberikan pada tiap-tiap tahap pemberdayaan. Analisis ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas

keterlibatan para *stakeholder*. Selanjutnya hasil dari pemetaan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

D. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Dinas PMD Kabupaten Tulungagung. Salah satu fokus pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Peningkatan ekonomi ini sangat penting dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini, harus terus di dukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing pada era globalisasi saat ini.

Secara konseptual “peningkatan” berasal dari kata “tingkat”, yang berarti “lapis” atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya (Harahap, 2018).

Secara konseptual “ekonomi” merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui perubahan-perubahan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi (Harahap, 2018). Secara asal kata, istilah “ekonomi” itu berasal dari bahasa

yunani, yaitu “oikonomia”. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata, yaitu “oikos” dan “nomos”. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Jadi arti asli oikonomia adalah mengatur rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa membicarakan ekonomi berarti membicarakan aturan, kaidah, dan cara mengelola suatu rumah tangga manusia. Rumah tangga disini bukanlah dalam arti sempit, melainkan menunjuk pada suatu kelompok sosial, yang dianggap sebagai rumah tangga kelompok sosial ini dapat berwujud perusahaan, desa, kota, bahkan negara (Rosyidi, 2004).

Sementara itu, secara konseptual masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama atau golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang melakukan interaksi dan saling bergaul dalam lingkungan sosial yang berupa satu kesatuan, hidup secara mandiri, bebas dan menghasilkan suatu kebudayaan, nilai, dan norma sosial (Soekanto, 2000). Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa, peningkatan ekonomi masyarakat dalam konteks ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung untuk menaikkan derajat/kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat.

Dalam usaha pemberdayaan masyarakat khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap yang perlu dilakukan (Anharudin, Fernando, Saefudin, Susandi, & Dwiyatno, 2019). Tahapan pertama adalah *assessment*. Tahap *assessment* merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Caranya dengan melakukan pengkajian maupun penilaian terhadap keadaan wilayah atau desa tempat melakukan pengabdian masyarakat. Metode yang bisa dilakukan dengan melakukan observasi (melihat langsung ke lokasi), *indepth interview* (wawancara

mendalam) kepada masyarakat calon mitra, dan studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki desa.

Dalam tahap ini, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung untuk ikut serta memberikan informasi terkait keadaan dan kondisi kehidupan mereka. Salah satu metode *assessment* yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA memiliki karakteristik yang selalu terbuka menerima cara-cara atau metode-metode baru yang dianggap cocok, sehingga mudah diterapkan dalam rangka penggalan potensi masyarakat. Dengan mengetahui potensi masyarakat, kita dapat menentukan metode apa yang tepat dalam penuntasan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat selama ini.

Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini masyarakat diberikan pelatihan, dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Narasumber yang dilibatkan juga berasal dari praktisi dan akademisi yang berkualitas. Kegiatan pelatihan ini mirip seperti kegiatan penyuluhan berupa edukasi mengenai bagaimana cara berwirausaha dan mengelola sektor usaha yang baik, kemudian memberikan beberapa eksperimen dan contoh bagaimana memulai mengelola sektor usaha baru, selanjutnya memberikan tips/strategi yang bisa dilakukan agar produk bisa laku dipasarkan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat inovasi produk, yang bisa diterima oleh masyarakat saat ini. Selain teori, dalam kegiatan ini masyarakat juga diajari praktek langsung bahkan dilakukan pendampingan sampai bisa mandiri dan berdaya.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di

lapangan. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, segera dilakukan pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan. Tahap ini cukup penting dilakukan mengingat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan program umum dilakukan, sehingga dengan adanya tahap evaluasi ini, kesalahan-kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki.

E. Tipologi Desa dan Kelurahan

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah yang cukup luas yaitu terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa (BPS Kab Tulungagung, 2020). Dari berbagai wilayah tersebut, masing-masing memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, baik karakteristik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia khususnya antara wilayah desa dan kelurahan. Dengan potensi yang berbeda-beda tersebut, diperlukan pemetaan tipologi wilayah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan sebaran potensi masing-masing. Tipologi ini penting dilakukan untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan di masing-masing wilayah berdasarkan karakteristik potensi yang dimiliki.

Secara sederhana tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa dan kelurahan (Despica, 2018). Tipologi atau klasifikasi desa/kelurahan ini secara umum meliputi tiga aspek (Despica, 2018). Ketiga aspek tersebut yaitu:

1. *Potensi Dasar*, potensi ini merupakan modal dasar dari desa/kelurahan yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan, yang terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi/letak desa/kelurahan.

2. *Tipe Desa/Kelurahan*, tipe ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan serta telah menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat. Contohnya seperti masyarakat pertanian, perkebunan, nalayan, perindustrian, atau pertokoan.
3. *Tingkat Perkembangan Desa*, tingkat perkembangan desa bisa dilihat/diukur berdasarkan Indikator Tingkat Perkembangan Desa. Indikator ini digunakan untuk melihat/mengukur sejauh mana perkembangan desa/kelurahan berdasarkan kurun waktu tertentu. Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan desa diantaranya adalah:
 - a. Perkembangan infrastuktur desa / kelurahan
 - b. Perkembangan fasilitas umum
 - c. Perkembangan akses informasi
 - d. Perkembangan kualitas sumber daya manusia
 - e. Perkembangan pendapatan penduduk.

Indikator pertama yang menjadi acuan perkembangan desa/kelurahan adalah perkembangan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur dapat dilihat terutamanya dari akses jalan raya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan realitas bahwa terdapat beberapa desa/kelurahan yang memiliki akses jalan raya yang mudah dilalui berbagai macam kendaraan, dan ada pula desa/kelurahan yang masih memiliki akses jalan raya yang buruk dan sulit dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Akses jalan raya ini menjadi salah satu indikator penting perkembangan desa mengingat jalan raya merupakan menentukan kemajuan sebuah desa/kelurahan. Dengan adanya akses jalan yang mudah, maka logistik atau barang-barang penduduk akan mudah didistribusikan, baik keluar maupun kedalam. Sebaliknya akses jalan yang buruk akan membuat logistik sulit untuk masuk maupun keluar dari desa/kelurahan.

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur perkembangan desa/kelurahan adalah perkembangan fasilitas umum. Sebagai pendukung pertumbuhan desa/kelurahan, perlu adanya fasilitas umum yang memadai sebagai penunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat atau penduduk setempat agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan tersebut diantaranya adalah: pasar yang memadai, sekolahan, dan puskesmas.

Indikator ketiga untuk melihat perkembangan desa/kelurahan adalah akses informasi. Akses informasi yang baik, dapat memajukan desa/kelurahan. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya akses informasi yang baik, penduduk desa/kelurahan bisa belajar atau mendapat berbagai informasi dari desa atau bahkan perkotaan lain di luar wilayahnya, sehingga apa yang sudah pernah berhasil dilakukan di wilayah lain bisa dicontoh dan diterapkan di daerahnya. Selain itu, berbagai ilmu pengetahuan bisa mudah diperoleh dari kemudahan akses informasi. Sangat jarang ditemukan sebuah desa/kelurahan dengan akses informasi yang minim bisa berkembang dengan pesat. Sebaliknya, desa/kelurahan yang memiliki akses informasi yang mudah, maka perkembangannya akan cepat. Oleh karena itu akses informasi sangat penting untuk dimiliki sebuah desa/kelurahan agar bisa berkembang dengan baik. Indikator perkembangan desa/kelurahan ini bisa dilihat dari sarana dan prasarana akses informasi dan kemudahan akses informasi.

Indikator perkembangan desa/kelurahan keempat dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Contoh indikator yang bisa digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan. Desa/kelurahan yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan desa/kelurahan yang kurang maju memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan. Selain pendidikan, jenis pekerjaan masyarakat juga dapat

digunakan untuk melihat kualitas SDM. Desa/kelurahan yang maju cenderung memiliki SDA yang bekerja sebagai tenaga profesional dengan kualifikasi pendidikan maupun keterampilan/keahlian tertentu di berbagai bidang pekerjaan, begitu sebaliknya.

Indikator terakhir yang digunakan untuk melihat perkembangan desa/kelurahan adalah pendapatan penduduk. Dalam indikator ini, desa/kelurahan dikatakan sudah maju ketika pendapatan penduduknya sudah di atas rata-rata, dan desa dikatakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih jauh dari cukup. Rata-rata yang dimaksud bisa berdasarkan UMR daerah setempat.

Penyusunan tipologi wilayah desa/kelurahan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun juga ada yang memiliki persamaan. Adapun daerah yang memiliki karakteristik yang sama, dimasukkan dalam kelompok tipologi yang sama. Masing-masing tipologi desa/kelurahan memiliki beragam potensi dan permasalahan yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan (Gai, Witjaksono, & Maulida, 2020). Berdasarkan keragaman indikator fisik dan non-fisik dalam menentukan penggolongan desa/kelurahan, serta mempertimbangkan perbedaan karakteristik, sehingga pengelompokan desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan didasarkan pada lingkungan fisik yang sama, sosial budaya masyarakat, posisi geografis, kondisi spasial, administrasi atau tingkat perkembangan desa/kelurahan. Pengelompokan ini bisa di sederhanakan menjadi tiga aspek seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu aspek potensi dasar, aspek tipe desa/kelurahan, dan aspek tingkat perkembangan desa.

F. Studi Terdahulu

Bagian ini secara khusus membahas mengenai studi/penelitian terdahulu yang memiliki tema sama dengan

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung. Studi terdahulu ini dapat dijadikan sebagai pijakan atau referensi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berbagai informasi dan pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat, dapat diperoleh dengan cara belajar dari kesalahan dan/atau keberhasilan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, peninjauan studi terdahulu ini penting dilakukan untuk kesuksesan upaya pemberdayaan masyarakat yang hendak dilakukan.

Studi *pertama* dilakukan oleh Muhammad Alhada Fuadilah Habib dan Mahyuddin dengan judul Evaluasi Pengelolaan Teknologi TPS 3R di Desa Wisata Religi Gunungpring Kabupaten Magelang. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai upaya pengembangan desa wisata yang dikelola oleh BUM Desa KSM Berkah. Upaya pengembangan ini dilakukan oleh pemerintah yaitu Balai Litbang Kementerian PUPR dengan membangun infrastruktur Teknologi TPS 3R untuk mengatasi permasalahan sampah di desa wisata tersebut. Hasil penelitian ini secara ringkas menjelaskan bahwa BUM Desa belum sepenuhnya berhasil mengelola desa wisata beserta infrastruktur yang telah diberikan pemerintah. Faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan BUM Desa ini adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengelola (SDM) yang kurang sesuai dengan yang seharusnya (Habib & Mahyuddin, 2021). Dengan demikian dapat diambil pelajaran bahwa kuantitas dan kualitas SDM pengelola BUM Desa sangat penting diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tenaga pengelola / pengurus BUM Desa harus mencukupi secara kuantitas, dan memiliki kualifikasi keahlian yang sesuai dengan posisi jabatan yang diberikan, serta memiliki komitmen kerja yang bagus.

Studi *kedua*, dilakukan oleh Fitria dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUM DESA). Studi ini secara ringkas mendeskripsikan mengenai bentuk dan metode pemberdayaan masyarakat beserta hasil dan implikasinya bagi masyarakat yang diberdayakan. Secara ringkas hasil studi ini menjelaskan bahwa proses pemberdayaan ekonomi yang dilakukan kepada BUM Desa Maju Makmur ini dilakukan dengan pemberian modal, bantuan pemasaran, kemitraan usaha dan penguatan kelembagaan. Adapun implikasi dari pemberdayaan ekonomi melalui BUM Desa ini adalah kemudahan menambah modal usaha, menambah produksi masyarakat, kemudahan mendapatkan sarana pertanian, peningkatan pendapatan, peningkatan kehidupan sosial ekonomi, dan menambah wawasan para pegawai/pengelola BUM Desa. Namun demikian ditemukan pula ada beberapa unit usaha yang hanya bertahan beberapa tahun saja dikarenakan tidak adanya pendampingan (Fitria, 2020). Berdasarkan studi ini dapat diambil pelajaran mengenai pentingnya pendampingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. BUM Desa perlu diberikan pendampingan dalam menjalankan usahanya sampai benar-benar mampu berdiri secara mandiri.

Studi *ketiga*, dilakukan oleh Syndi Dwi Purnamasari dan Muhammad Farid Ma'ruf dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) (Studi BUM DESA Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). Studi ini secara sederhana mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Mawar yang dilakukan melalui empat prinsip pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Mawar secara umum berjalan cukup baik. Melalui prinsip kesetaraan, masyarakat diberikan hak suara dan kebebasan untuk mengikuti program yang ada tanpa membedakan gender ataupun golongan. Melalui prinsip partisipasi, BUM Desa melakukan pendampingan dan

mengadakan sosialisasi/pelatihan dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dari dinas terkait. Melalui prinsip keswadayaan/kemandirian, BUM Desa memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan usulan mengenai program yang akan di adakan. Melalui prinsip berkelanjutan, target bertambahnya jumlah anggota dan bertambahnya sektor usaha diharapkan dapat menjadikan BUM Desa ini bisa lebih maju dan lebih berkembang kedepannya. Namun demikian, dalam pelaksanaan prinsip partisipasi, sosialisasi/pelatihan yang dilakukan seringkali tidak diimbangi dengan adanya praktik, sehingga masyarakat menjadi kurang bminat untuk mengikuti program dan masyarakat susah memahami dan mempraktekkan secara langsung ilmu yang telah didapat dari kegiatan sosialisasi/pelatihan (Purnamasari, 2020). Berdasarkan studi ini dapat diambil pelajaran betapa pentingnya praktik langsung dalam kegiatan sosialisasi/pelatihan kepada masyarakat. Dengan demikian, kedepannya ketika melakukan kegiatan sosialisasi/pelatihan dalam upaya pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Tulungagung, perlu diupayakan untuk melakukan praktik secara langsung agar masyarakat menjadi mudah dalam memahami materi yang disampaikan.

Studi *keempat*, dilakukan oleh Venita Sofiani, Luthpi Saepuloh, dan Elan Eriswanto dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai upaya pengembangan BUM Desa melalui sosialisasi dan pelatihan penyusunan administrasi laporan keuangan desa dan pengembangan unit usaha desa. Hasil studi ini secara garis besar menemukan bahwa aparatur desa kurang menyambut baik upaya perbaikan pembuatan laporan administrasi keuangan desa. Namun demikian, aparatur desa sangat tertarik dan menyambut baik upaya pengembangan BUM Desa dalam hal pengembangan produk potensi desa

(Sofiani, Saepuloh, & Eriswanto, 2017). Berdasarkan studi ini dapat diketahui bahwa upaya pengembangan BUM Desa khususnya perbaikan administrasi laporan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Berdasarkan realitas ini, Dinas PMD Kabupaten Tulungagung perlu mengetahui sedini mungkin kemungkinan permasalahan ini, sehingga dapat segera mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Solusi ini perlu diupayakan agar pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tulungagung tidak terkendala permasalahan ketertiban administrasi laporan keuangan. Mengingat laporan keuangan merupakan aspek penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola BUM Desa terhadap modal yang telah diberikan, serta sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan/penyelewengan modal/keuntungan yang diperoleh BUM Desa.

Studi *kelima*, dilakukan oleh Devi Nur Puspitasari, Hardi Warsono, dan Ida Hayu DM dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUM Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai factor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan BUM Desa Tirta Mandiri sehingga memperoleh banyak penghargaan dan menjadi BUM Desa percontohan di Indonesia. Hasil studi ini menjelaskan bahwa kesuksesan BUM Desa Tirta Mandiri tidak didapatkan secara instan namun melalui serangkaian proses pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok. Faktor utama yang menjadi penyebab kesuksesan BUM Desa ini adalah keterlibatan aktif pemerintah desa yang tidak lelah melakukan studi literasi dengan menggandeng berbagai akademisi dan konsultan agar Desa Ponggok bangkit menjadi desa yang maju dan terentaskan dari garis kemiskinan. Selain itu, berbagai inovasi usaha juga terus dikembangkan oleh BUM Desa Tirta Mandiri supaya mampu bersaing dan mengikuti perkembangan jaman. Selain itu, untuk kemajuan BUM Desa ini, pemerintah desa turut menggandeng berbagai lembaga ekonomi tingkat desa seperti Pokdarwis Wanua

Tirta dan UKM Nila Murni (Puspitasari, Warsono, & DM, 2020). Berdasarkan studi ini, dapat diambil pelajaran berupa pentingnya peran aktif pemerintahan desa dalam upaya memajukan BUM Desa, sehingga Dinas PMD Kabupaten Tulungagung perlu berupaya untuk mendorong peran aktif pemerintah desa dalam upaya memajukan BUM Desa di masing-masing wilayah. Selain itu, dapat diketahui pula pentingnya peran akademisi dan konsultan serta keterlibatan berbagai lembaga ekonomi tingkat desa dalam upaya memajukan BUM Desa. Berbagai inovasi produk juga perlu terus diupayakan oleh BUM Desa agar produk-produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat secara luas sehingga produk yang dihasilkan BUM Desa dapat menghasilkan banyak profit.

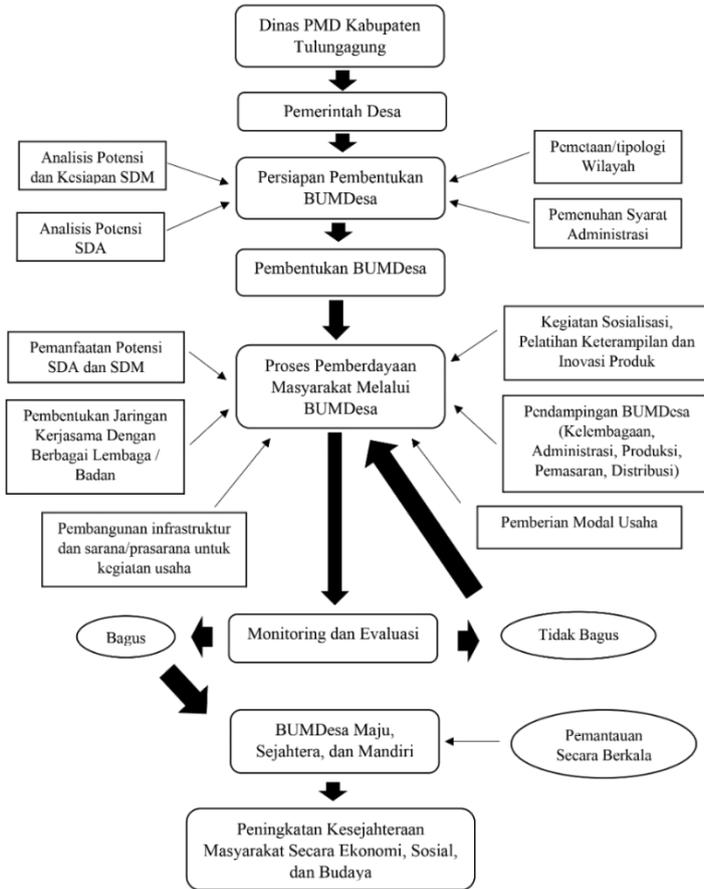
Berdasarkan studi-studi terdahulu yang telah dipaparkan di atas, Dinas PMD Kabupaten Tulungagung dapat menjadikannya sebagai referensi untuk program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa. Berbagai kesalahan hasil evaluasi dapat diantisipasi agar tidak terjadi di Kabupaten Tulungagung, serta berbagai faktor/aspek pendukung keberhasilan dapat diserap untuk diterapkan di Kabupaten Tulungagung setelah melalui berbagai penyesuaian.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual secara sederhana dapat didefinisikan sebagai formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung kegiatan penelitian atau bisa juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang juga membutuhkan kerangka teoritis sebagai acuan pelaksanaannya (Notoatmodjo, 2010). Adapun kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung melalui pembentukan BUM Desa, dapat dilihat melalui bagan alur pada gambar 2.1.

Kerangka konseptual dalam gambar 2.1 menjelaskan mengenai alur konseptual proses pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung melalui pembentukan BUM Desa. Secara umum langkah pertama yang dilakukan Dinas PMD Kabupaten Tulungagung adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Koordinasi dengan pemerintah desa ini sangat penting dilakukan mengingat lokasi pembentukan BUM Desa berada di bawah naungan pemerintah desa secara langsung, dan ke depannya banyak kegiatan BUM Desa yang melibatkan peran serta pemerintah desa.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan BUMDesa (Sumber: Tim Penyusun)

Setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, dan sudah mendapat persetujuan serta dukungan dari pemerintah desa, tahap selanjutnya adalah melakukan persiapan pembentukan BUM Desa. Tahap persiapan ini meliputi pemetaan/tipologi desa berdasarkan karakteristik masing-masing desa. Kemudian melihat kesiapan dan potensi SDM calon pengelola BUM Desa yang akan menjalankan seluruh kegiatan operasional BUM Desa ke depannya. Selanjutnya melihat potensi SDA untuk menentukan jenis/model usaha yang akan dikembangkan, dan terakhir melengkapi seluruh syarat administrasi pembentukan BUM Desa.

Setelah seluruh tahap persiapan dijalankan dengan baik, langkah selanjutnya adalah pembentukan BUM Desa. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BUM Desa ini adalah sistem rekrutmen tenaga pengelola (SDM) BUM Desa yang harus mampu menjaring tenaga-tenaga profesional di bidangnya dan memiliki komitmen kerja yang bagus. Di samping itu syarat administrasi juga harus lengkap dipersiapkan.

Langkah selanjutnya setelah BUM Desa dibentuk secara resmi adalah proses pemberdayaan BUM Desa. Proses pemberdayaan ini sangat penting dilakukan agar BUM Desa yang sudah dibentuk benar-benar bisa berjalan/beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam tahap pemberdayaan ini, cukup banyak kegiatan yang perlu dilakukan, mulai dari kegiatan sosialisasi atau pelatihan kepada para pengurus BUM Desa dan masyarakat terkait, dalam rangka transfer *knowledge* dan keterampilan. Kemudian membantu menganalisis potensi SDA dan SDM yang dimiliki dan membantu proses pemanfaatannya secara optimal. Selanjutnya membantu membangun jaringan dengan berbagai badan/lembaga untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan BUM Desa.

Dinas PMD Kabupaten Tulungagung selanjutnya membantu BUM Desa mendapatkan modal awal untuk

kegiatan usaha, mulai dari dana dari desa, dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah provinsi, maupun dari pemerintah pusat. Lalu Dinas PMD Kabupaten Tulungagung juga membantu proses pembangunan atau pembelian infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional BUM Desa. Dinas PMD Kabupaten Tulungagung juga melakukan pendampingan terhadap seluruh kegiatan BUM Desa pada awal-awal berdiri, mulai dari kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, pelengkapan administrasi (termasuk laporan keuangan).

Setelah pemberdayaan BUM Desa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini menggunakan indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Hasil monitoring dan evaluasi ini menghasilkan pengelompokan BUM Desa yang sudah berhasil dan masih gagal. BUM Desa yang masih gagal, dilakukan pemberdayaan kembali. Sementara itu, BUM Desa yang sudah berhasil akan menjadi BUM Desa yang mandiri, sejahtera dan maju, BUM Desa seperti ini berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. BUM Desa yang sudah berhasil mandiri ini, tidak serta-merta dilepas, namun Dinas PMD Kabupaten Tulungagung tetap melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tetap berjalan semestinya.

H. Daftar Pustaka

- Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alhamuddin, Aziz, H., Inten, D. N., & Mulyani, D. (2020). Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development (ABCD) untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Madrasah di Era Industri 4.0. *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING, IV(4)*, 321-331.

- Anharudin, Fernando, D., Saefudin, Susandi, D., & Dwiyatno, S. (2019). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Keterampilan Membuat Nugget Berbahan Dasar Ikan Bandeng Sebagai Bahan Pangan Lokal. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, XIX(2), 141-149.
- BPS Kab Tulungagung. (2020, Maret 9). *Jumlah Desa Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung 2015-2019*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung: <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2020/03/09/5099/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulungagung-2015-2019.html>
- Despica, R. (2018). TIPOLOGI DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN. *Jurnal Spasial*, III(5), 39-43.
- Fithriyana, E. (2020). Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, I(2), 1-9.
- Fitria. (2020). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA). *Adl Islamic Economic*, I(1), 13-28.
- Fitriawan, F. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Budidaya Jamur Tiram. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement*, I(1), 47-58.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: CV. Dream Litera Buana.
- Habib, M. A., & Mahyuddin. (2021). EVALUASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TPS 3R DI DESA WISATA RELIGI GUNUNGPRING KABUPATEN MAGELANG. *Ar*

Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, I(1), 1-34.

- Hamid, H. (2018). *MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Makassar: De La Macca.
- Harahap, I. S. (2018). Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis PeDesan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, II(2)*, 101-115.
- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Maulana, M. (2019). *ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, IV(2)*, 259-278.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur, M., & Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Nominal, I(1)*, 24.
- Purnamasari, S. D. (2020). Muhammad Farid Ma'ruf. *Publika, VIII(5)*, 1-12.
- Puspitasari, D. N., Warsono, H., & DM, I. H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUM Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, II(1)*, 70-83.
- Rahman, N. E. (2018). Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo. *Jurnal PKS, VII(3)*, 208.

- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, III(1), 115-126.
- Rosyidi, S. (2004). *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salman, D. (2012). Manajemen Perencanaan berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi serta Peran Fasilitator. Makassar: Sulawesi Capacity Development Project KerjasamaKemendagri dan JICA. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofiani, V., Saepuloh, L., & Eriswanto, E. (2017). PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DESA KARANGJAYA KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN SUKABUMI. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya PerDesan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V"*. VII, hal. 1-7. Purwokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.
- Suardi, Mallongi, S., & Baharuddin, D. (2019). Model Pembangunan Pertanian Melalui Penerapan Agropolitan Berbasis Partisipasi di Kabupaten Pinrang dengan Pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). *PARADOKS : JURNAL ILMU EKONOMI*, II(4), 48-61.
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyu, Golar, & Massiri, S. D. (2019). ANALISIS KEPENTINGAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI HUTAN DESA
NAMO KECAMATAN KULAWI. *JURNAL FORESTSAINS*,
XVI(2), 105 - 116.

Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, *XII*(1), 17.

Wrihatnolo, R. R. (2007). Manajemen Pemberdayaan Sebuah
Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan.
Makassar: Desertasi Universitas Hasanuddin.

BAB III

METODOLOGI

A. Pendekatan dan Jenis Pemberdayaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) dalam memberikan layanan pemberdayaan kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan potensi (*Asset based*) yang dimiliki oleh Desa. Jenis pemberdayaan dilakukan dengan memberikan aksi langsung (*Action research*) dan memberikan solusi terhadap kesulitan yang dialami desa dalam menciptakan peran serta masyarakat. Penulisan paper ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pembahasan secara holistic terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas PMD, dengan menekankan pada hasil percakapan dari informan utama dan pendukung. (Creswel, 2017; Ponelis, 2015)

B. Lokasi Pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan oleh Dinas PMD kepada Desa-desanya, diantaranya Desa yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga perlu diberikan dukungan regulasi serta alokasi pendanaan baik bersumber dari alokasi Dana Desa, Sinergi dengan pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat. Dinas PMD menjalin komunikasi dengan segenap stakeholders untuk memudahkan pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat di tiap Desa. Selain Desa berpotensi Maju, Desa dalam kategori belum bergerak diajak untuk berfikir melalui analisis potensi desa sehingga Desa segera bisa menentukan tindak lanjut dan melangkah untuk bisa melaksanakan pemberdayaan yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat dan tata kelola Desa.

C. *Asset Based Community Development*

Pemberdayaan oleh Dinas PMD ini menggunakan pendekatan (ABCD) *Asset Based Community Development*, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi Desa dan masyarakat sekitar. Masyarakat merupakan aset yang berharga bagi desa. Adanya pemuda merupakan generasi penerus untuk melanjutkan dan mengisi pembangunan yang berlangsung atau yang akan datang. Keberagaman masyarakat desa dapat menjadi potensi dan ragam ketrampilan, dan juga sumber daya alam (SDA). (Mathie et al., 2017)

Dengan adanya sebuah Wisata yang berbasis masyarakat yang mencirikan keunikan masing-masing desa misalnya, bisa menjadikan kemajuan Desa dan masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi desa, berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan partisipasi masyarakat. (Muthuri et al., 2012) Sehingga tidak ayal, hadirnya wisata mampu meningkatkan ekonomi Desa. Kondisi ini akan meminimalisir pengangguran dan menambah pendapatan masyarakat.

Langkah pemberdayaan dengan teknik ABCD antara lain dilakukan dengan menemukan (*discovery*), membangun mimpi (*dream*), merancang (*Design*), menentukan (*Define*), Lakukan (*destiny*). (Dureau, 2017) langkah tersebut dilakukan Dinas PMD untuk menjadikan Desa yang memiliki komunitas-komunitas diantaranya Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dst diajak menemukan potensi yang dimiliki desa baik dari unsur pertanian, sumber daya manusia masyarakat, usaha kreatif masyarakat. Bahwa setiap potensi bisa dikembangkan, menjadi mimpi bagi masyarakat Desa, sehingga semangat untuk bergerak semakin besar. Setiap cita-cita yang diinginkan desa diajak untuk membuat rancangan baik dalam bentuk proposal, TOR maupun satuan aktifitas yang bisa menjadi acuan pelaksanaan bagi semua unsur. Penentuan setiap pilihan pekerjaan yang mampu mendorong

masyarakat berkembang didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk menjalankan, sehingga tidak saja ide dan gagasan yang besar, namun tidak bisa dijalankan, tapi gagasan sedang tapi Desa dan masyarakat bisa menjalankan. Menjalankan bagian dari langkah yang disusun menjadi kewajiban yang harus dilakukan sehingga bisa menuntut hasil sesuai harapan. Ketika semua poin dilakukan, wal hasil desa-desa mampu menunjukkan adanya peningkatan perekonomian Desa, masyarakat memiliki pendapatan dan Desa mendapatkan pendapatan sebagai bagian dari keuangan Desa.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapat secara langsung melalui wawancara aktif dengan pihak terkait. Sumber data primer berupa data yang terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas PMD. Dalam pengumpulan data metode yang dipilih adalah metode *purposive sampling*, dimana dilakukan memilih informan yang dianggap bisa dipercaya informasinya untuk menjadi sumber data yang mantap dalam mengetahui masalahnya oleh peneliti.

Pengumpulan data, diperoleh peneliti secara langsung berasal dari sumber data primer dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*).

Sumber informasi yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas PMD Kabupaten Tulungagung.
- b. Kelompok Pemberdayaan dalam hal ini adalah BUM Desa dan Desa.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian merupakan data pendukung yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMD. Sumber data sekunder

diperoleh melalui beberapa media bahan pustaka seperti website resmi, buku, dokumen, laporan, literature, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber tertulis lainnya sesuai masalah dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (*indept interview*)

Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*indept interview*), dimana terjadi interaksi aktif yang didalamnya terdapat tukar pendapat, sharing aturan, tanggungjawab, perasaan, motif, kepercayaan dan informasi. Harapannya dengan wawancara mendalam (*indept interview*) baik secara langsung maupun tak langsung dengan narasumber/informan terkait masalah yang sedang diteliti ini akan dapat memperoleh data, baik secara lisan maupun tulisan atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan.

2. Studi literature/Kepustakaan

Kegiatan yang dilakukan adalah membaca, mengkaji, menganalisis, dan membuat catatan dari sumber-sumber bacaan yang dibutuhkan. Termasuk didalamnya adalah buku, Peraturan Perundang-Undangan, dokumen, arsip serta tulisan-tulisan terkait dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode tersebut dilakukan dengan Model analisis interaktif terhadap komponen pengumpulan data dimana peneliti tetap aktif bergerak di antara komponen pengumpulan data, yang meliputi:

1. Reduksi data (*data redaction*)

Pada tahap ini peneliti membuat rangkuman terhadap hal-hal penting, melakukan seleksi serta mencari tema dan

pola penelitian. Dari data yang telah dilakukan reduksi akan lebih jelas dan mudah bagi peneliti untuk melakukan kegiatan mencari dan pengumpulan data berikutnya jika masih diperlukan lagi.

2. Penyajian data (*data display*)

Pada tahapan penyajian data, peneliti membuat display data berupa uraian singkat, bagan, *flowchart*, hubungan antara kategori, dan data sejenisnya. Dengan display data yang sudah dibuat, diharapkan apa yang terjadi mudah dipahami sehingga bisa menyusun rencana kerja selanjutnya berdasarkan hal tersebut.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Melakukan penarikan kesimpulan, dimana peneliti memferivikasi kegiatan yang dilakukannya secara teliti dan hati-hati data yang tersaji dengan mengulangnya dari tahap pengumpulan data sebelumnya.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan temuan dilakukan sebelum mulainya pengamatan, sampai data telah dihasilkan, dilakukan validasi data sehingga semakin menguatkan. Berikutnya peneliti focus menguji kredibilitas data yang telah diperoleh. Data tersebut valid atau tidak ketika di croscek kan ke lokasi penelitian, berubah atau tidak. Jika ternyata kredibilitas data sudah benar setelah dicek kembali kelapangan maka observasi lapangan dapat diakhiri.

H. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Melakukan pembuatan proposal dimana didalamnya terdapat rancangan penelitian yang berisikan usulan penelitian
- b. Melakukan seleksi tempat penelitian dan menentukan pilihan lapangan penelitian.

- c. Setelah tempat penelitian ditentukan maka langkah berikutnya adalah pengurusan perizinan, karena surat ijin penelitian harus sudah diperoleh sebelum penelitian dilaksanakan.
- d. Melakukan observasi pra penelitian dalam rangka mengamati keadaan lapangan.
- e. Saat observasi, peneliti menentukan informan yang akan diwawancarai. Informan dalam penelitian ini adalah Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan kelompok BUM Desa.
- f. Memperhatikan etika penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- a. Pertama-tama yang dilakukan adalah mempersiapkan diri untuk meneliti dengan memahami latar belakang dilakukannya penelitian.
- b. Tahapan berikutnya adalah melakukan penelitian di lapangan.
- c. Tahap berikutnya adalah melakukan pengumpulan data secara aktif.

3. Tahap Analisis Data

- a. Pada Tahapan ini, peneliti melakukan analisis data telah ditentukan tata caranya sebelum dilakukan penelitian, yakni melalui *indept interview* atau wawancara mendalam dengan subyek penelitian yang ada di dinas PMD Kabupaten Tulungagung.
- b. Berikutnya, yang dilakukan peneliti adalah mengecek keabsahan data dengan cara melakukan pengecekan terhadap sumber data dan metode yang dipakai untuk memperoleh data. Harapannya dengan pengecekan ini data yang didapatkan benar-benar sesuai sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data. Yang mana jika datanya sesuai dengan konteks permasalahan yang sedang diteliti maka akan memudahkan proses penelitian.

4. Tahap Pelaporan Data

Pada akhir suatu penelitian tahap pelaporan data merupakan cara untuk mengkomunikasikan hasil penelitian. Penyusunan laporan hasil penelitian tidak dilakukan sembarangan tetapi sudah diatur sesuai dengan prosedur dan format resmi yang sudah ditentukan.

I. Daftar Pustaka

- Creswel, J. W. (2017). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dureau, C. (2017). *Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan*. <https://docplayer.info/39269917-Australian-community-development-and-civil-society-strengthening-scheme-access-tahap-ii.html>
- Mathie, A., Cameron, J., & Gibson, K. (2017). Asset - based and Citizen - led development: Using a Diffracted Power Lens to Analyze the Possibilities and Challenges. *Progress in Development Studies*, 17(1), 54–66.
- Muthuri, J. N., Moon, J., & Idemudia, U. (2012). Corporate Innovation and Sustainable Community Development in Developing Countries. *Business & Society*, 51(3), 355–381. <https://doi.org/10.1177/0007650312446441>
- Ponelis, S. R. (2015). Using Interpretive Qualitative Case Studies for Exploratory Research in Doctoral Studies: A Case of Information Systems Research in Small and Medium Enterprises. *International Journal of Doctoral Studies*, 10, 535–550. <https://doi.org/10.28945/2339>

BAB IV
MASTER PLAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PMD TULUNGAGUNG

A. Pendahuluan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan kerjanya didasarkan pada perencanaan yang matang. Perencanaan dilakukan Dinas PMD setiap tahunnya guna menghasilkan output sesuai harapan. Perencanaan juga merupakan wujud keterpaduan program dalam ranah wilayah Tulungagung sebagai pengejawantahan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung.

Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yaitu harapan dari pengembangan desa-desa secara *bottom up*. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi harapan yang sedang berkembang di masyarakat mengingat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan garis koordinasi strategis antara Desa dan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung.

Koordinasi secara baik dalam rangka perencanaan dilakukan secara horizontal sesama dinas di bawah pemerintahan Kabupaten Tulungagung untuk mensinergikan visi misi pemerintahan Kabupaten Tulungagung.

B. Master Plan Dinas PMD Tulungagung

Berikut master Plan Dinas PMD Kabupaten Tulungagung:



Bagan 4.1 Master Plan Dinas PMD Tulungagung (Sumber: Dinas PMD Tulungagung)

Bagan 4.1 menunjukkan bahwa master plan dinas PMD Tulungagung secara detail dijelaskan dalam deskripsi berikut:

1. Maping BUM Desa

Mapping BUM Desa dilakukan dengan mengidentifikasi dan melakukan pendataan BUM Desa dengan menghasilkan 65 BUM Desa Maju, 97 BUM Desa berkembang dan BUM Desa pemula 95 BUM Desa.

2. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dijalankan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

3. Peningkatan Kapasitas BUM Desa

Peningkatan kapasitas BUM Desa diselenggarakan dalam bentuk rapat koordinasi antara BUM Desa dan Dinas PMD. Selain itu dilakukan dalam bentuk bimbingan

teknis menyangkut operasional BUM Desa serta webinar.

4. Pengembangan unit usaha BUM Desa

Pengembangan unit usaha BUM Desa direncanakan dengan melakukan sinergi, kemitraan antara BUM Desa dengan Perbankan, PT. Pos, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan dan Perguruan Tinggi.

5. Memfasilitasi Forum BUM Desa Kecamatan dan Kabupaten

Forum BUM Desa Kecamatan dan Kabupaten diinisiasi oleh Dinas PMD dalam rangka saling evaluasi, saling memberikan masukan antar sesama BUM Desa. Forum ini menjadi ruang kolaborasi berbagai produk yang bisa dijalankan antar BUM Desa.

6. Fasilitasi Permodalan melalui optimalisasi dana dan penguatan sarpras ekonomi desa

Optimalisasi dana BUM Desa direncanakan Dinas PMD dengan menekankan pada penyertaan modal dari Desa untuk pengembangan BUM Desa agar mampu meluaskan produk dan jangkauan bisnis yang dikelola BUM Desa.

7. Klinik BUM Desa

Klinik BUM Desa direncanakan untuk mendiagnosa kondisi BUM Desa dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh BUM Desa. Klinik ini dilakukan dengan kerjasama antara akademisi dan Dinas PMD Tulungagung.

8. Fasilitasi aplikasi SIA BUM Desa

Aplikasi SIA BUM Desa ditujukan untuk melihat progress BUM Desa secara matematis atas kinerja BUM Desa. Hal ini akan mempermudah audit yang dilakukan oleh BPKP.

9. Marketplace BUM Desa

Marketplace BUM Desa berupa pasardeso.tulungagung.go.id ditujukan untuk menjadi etalase atas produk yang dikelola oleh BUM Desa dan masyarakat agar mampu menjangkau konsumen lebih luas.

BAB V

PEMBERDAYAAN SEKTOR USAHA MASYARAKAT DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA

A. Pendahuluan

Masyarakat berdaya menjadi suatu tujuan bagi setiap pemangku kepentingan. Dinas PMD memiliki fokus dalam upaya mewujudkan peningkatan perekonomian Desa. Melalui Bidang pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berupaya menggali potensi di masyarakat untuk ditingkatkan kapasitas yang dimiliki agar memiliki nilai tambah baik dari sisi manfaat maupun sisi ekonomi yang meningkat. Potensi ini digali melalui pantauan langsung Dinas PMD ke desa-desa dan juga atas inisiasi Desa yang telah mengidentifikasi usaha yang berpotensi dikembangkan.

Potensi yang sudah teridentifikasi di cocokkan dengan program yang tepat pada tahun anggaran yang sama baik dari dana pusat, daerah Jawa Timur maupun Dana dari APBD Kabupaten Tulungagung. Desa dengan kesadarannya mengusulkan dengan membuat proposal agar program yang diinisiasi lekas mendapatkan kebijakan yang sama dari regulasi yang ada. Melalui pendampingan dan komunikasi yang dilakukan dinas PMD dengan pemerintah propinsi Jawa Timur, program *Sinau Neng Deso* (*Sinandu*) dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi masyarakat khususnya peserta pelatihan.

B. Sektor Usaha Masyarakat

Usaha Masyarakat memiliki beragam bentuk sesuai dengan keahlian dan potensi alam yang tersedia. Potensi alam yang ada di Kabupaten Tulungagung diantaranya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industry kecil menengah. Semua sector yang ada dimasyarakat berpotensi untuk terus dikembangkan hingga memunculkan kemandirian bagi masyarakat. Selain itu usaha yang sudah berkembang, mampu menyerap tenaga kerja sekitar, sehingga mengurangi pengangguran. Tenaga kerja mendapatkan penghasilan dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat yang meningkat akan memperlancar produksi masyarakat sesuai kebutuhan. UMKM bergeliat karena produknya merupakan permintaan masyarakat. Hasil perkebunan memiliki daya saing karena masyarakat mampu mengolah hasil perkebunan menjadi hasil yang lebih berkualitas, tahan lama. Seperti jeruk misalnya, jika dijual jeruk, maka harga perkilo berkisar 10 ribu dari petani. Namun setelah diolah menjadi minuman kemasan, maka memiliki nilai lebih yaitu harga lebih bersaing, tidak cepat busuk, dan bisa dijual jarak jauh karena tidak khawatir membusuk.

Diantara sector usaha masyarakat yang diberdayakan oleh dinas PMD antara lain hasil perkebunan jeruk, hasil peternakan berupa susu menjadi keju, sector perikanan diolah menjadi bakso ikan, nugget dll, kotoran peternakan untuk menjadi biogas yang bermanfaat menjadi pupuk alami.

C. Bentuk Pemberdayaan Dinas PMD

Bentuk pemberdayaan sector usaha masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas PMD melalui program Sinandu (Sinau nang Deso). Adapun kegiatan pelatihan tersebut antara sebagaimana yang disampaikan oleh **(Nurhadi Alfatah, S.E, Kasi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna)** adalah:

1. Pengolahan buah jeruk biar awet

Pelaksanaan Sinau Neng Deso (Sinandu) diselenggarakan di Desa Samar Kecamatan Pagerwojo. Output dari pelatihan ini, masyarakat Desa Samar yang tergabung dalam kelompok perkebunan Jeruk menjadi terlatih, adanya peningkatan nilai tambah untuk barang dan daya tahan makanan lebih lama.



Gambar 5.1
Pelatihan pengolahan buah jeruk
Sumber; Dokumen Sinandu Dinas PMD

Pelatihan pengolahan buah jeruk dilakukan oleh kelompok perkebunan Jeruk nipis, dan hasilnya menjadi minuman yang siap dikonsumsi dalam kemasan botol siap saji.



Gambar 5.2
Pelaksana Pelatihan pengolahan buah jeruk
Sumber; Dokumen Sinandu Dinas PMD

Pelatihan pengolahan hasil perkebunan jeruk ini diselenggarakan oleh Dinas PMD bersumber dari anggaran belanja Propinsi Jawa Timur tahun 2020.

2. Pembuatan Keju dari susu

Pelatihan pembuatan keju berbahan susu diselenggarakan di Desa Samar Kecamatan Pagerwojo Tulungagung. Harapan dari terselenggaranya kegiatan ini agar ketrampilan masyarakat meningkat, dan kemudian BUM Desa mampu mengembangkan. Pelaksanaan pelatihan ini diselenggarakan pada tahun 2020.



Gambar 5.3
Produk olahan keju susu
Sumber; Dokumen Sinandu Dinas PMD

3. Aneka masakan Ikan, naget, bakso dll

Pelatihan pengolahan hasil tangkapan ikan menjadi aneka masakan ikan, naget dan bakso dilaksanakan di Kampung nelayan Klatak, Kebo ireng. Hal itu disampaikan oleh kepala Desa Kebo ireng bapak Supirin, bahwa benar bahwa tahun 2020 ada pelatihan pengolahan hasil tangkapan ikan. Kegiatan tersebut di danai oleh Sumber pendanaan kegiatan berasal dari alokasi anggaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2020 (al-Fatah, dinas PMD Tulungagung).



Gambar. 5.4
Pelatihan pengolahan hasil olahan ikan tangkap
Sumber; Dokumen Sinandu Dinas PMD

Disampaikan ibu Lilis (Ketua PKK desa Keboireng) bahwa kegiatan itu dilaksanakan pada 22 Oktober 2020. Pelatihan itu diikuti oleh 30 orang ibu-ibu PKK dan beberapa dari pedagang ikan bakar pantai Gemah Tulungagung. Antusias masyarakat untuk melakukan praktik pengolahan ikan menjadi berbagai menu olahan ikan diantaranya bakso ikan, naget, gulai ikan cara pengolahan & memasak ikan bakar.



Gambar. 5.5
Hasil olahan naget ikan
Sumber; Dokumen Sinandu Dinas PMD

Hasil praktik olahan ikan tersebut harapannya menjadi bagian substitusi jenis lauk pauk yang siap dikonsumsi masyarakat untuk meningkatkan gizi warga.

4. Pelatihan pembuatan biogas

Pelatihan pembuatan biogas dilaksanakan di desa Samar Kecamatan Pagerwojo. Peserta pelatihan adalah masyarakat desa Samar yang tergabung dalam kelompok ternak desa Samar. Dengan pelatihan ini diharapkan masyarakat bisa meningkatkan pengetahuan pembuatan pemanfaat limbah ternak sapi. Desa Samar Pagerwojo. Sumber pendanaan berasal dari anggaran daerah propinsi Jawa Timur pada tahun 2020.



Gambar 5.6
Pelatihan Biogas limbah ternak
Sumber; dokumen Sinandu Dinas PMD

5. Pelatihan pembuatan Gazebo

Pelatihan pembuatan Gazebo dilaksanakan di desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo. Hal ini diakui bapak Kades Mulyosari, bahwa tahun 2020 ada pelatihan pembuatan Gazebo. Peserta pelatihan adalah masyarakat desa Samar yang tergabung dalam kelompok perkebunan Pring Petung desa Mulyosari Pagerwojo. Dengan pelatihan ini diharapkan masyarakat bisa meningkatkan pengetahuan pembuatan pring petung untuk dibuat gazebo agar memiliki nilai jual lebih besar.



Gambar 5.6
Pelatihan Pembuatan Gazebo
Sumber: Dokumen pelatihan dinas PMD

Masyarakat terlihat semangat untuk menjadikan bambu petung tersebut menjadi bangunan gazebo yang bisa di pasarkan kepada masyarakat luas.

D. Peningkatan Ekonomi Desa dari sector Usaha Masyarakat

Tujuan pelaksanaan sinandu diantaranya antara lain:

1. Pengolahan jeruk

Pengolahan hasil perkebunan jeruk memiliki tujuan berupa meningkatnya keahlian masyarakat di desa dalam mengolah buah jeruk menjadi minuman cepat saji. Sebagaimana pelatihan Ridawati dan Alsihendra, bahwa setelah pelatihan pembuatan serbuk kunyit asam, keahlian masyarakat meningkat. (Ridawati & Alsihendra, 2021) Keahlian masyarakat terkait minuman jeruk cepat saji memberikan nilai tambah yaitu jeruk bisa dikonsumsi secara cepat, tahan lama.

Buah jeruk yang pada umumnya jika tidak laku akan membusuk, maka dengan diolah akan memberikan jangka waktu pakai lebih panjang. Selain itu jeruk pada umumnya dijual murah, karena menjadi minuman cepat saji, maka harganya lebih meningkat. Jika buah jeruk perkilo dihargai 15 ribu, maka 1 kg jeruk mampu dibuat menjadi 20 kemasan jeruk, @Rp. 3.000,- maka perkilo jeruk dapat menghasilkan kotor Rp. 60.000,-. Artinya minuman kemasan jeruk akan meningkat 3x lipat dibandingkan dengan dijual jeruk biasa. Meningkatnya keahlian masyarakat ini pada akhirnya dapat yang meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini sesuai dengan pelatihan yang dilakukan Putra dan Ismail, bahwa pelatihan pembuatan jeruk memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk yang dijual buah pada umumnya. (Putra & Ismail, 2016)

2. Pembuatan Keju dari susu

Pengolahan hasil peternakan susu memiliki tujuan berupa meningkatnya keahlian masyarakat di desa dalam mengolah susu sapi perahan menjadi keju. Hal ini dapat berperan dalam optimalisasi pengelolaan sapi perah di masyarakat.(Astuti et al., 2011) Keahlian masyarakat terkait pembuatan keju susu memberikan nilai tambah yaitu keju dapat dipadatkan sehingga tahan lama. Jika susu cair bermanfaat jangka pendek, maka dengan diolah menjadi keju, maka dapat dijual dalam daya tahan lebih lama.(Astuti et al., 2011; Fitri et al., 2020; Riwayati et al., 2018; Salim et al., 2020)

Keju bisa menjadi bahan untuk produk olahan lain atau menjadi toping bagi makanan lain seperti pisang keju, bahan pembuat kue, dst. Perahan susu pada umumnya jika tidak laku akan basi, maka dengan diolah menjadi keju akan memberikan jangka waktu pakai lebih panjang. Selain itu susu perahan pada umumnya dijual pada koperasi susu yang harganya standard, karena menjadi keju susu, maka harganya lebih meningkat. Jika buah susu perliternya dihargai 6500 rupiah (beli kepetani dalam jumlah besar) dan 7000 rupiah pembelian ecer (Hesti, warga Sendang Tulungagung), maka 1 liter susu mampu dibuat menjadi beberapa Loyang keju susu. Artinya nilai jual keju susu meningkat 4x lipat dibandingkan dengan dijual susu dalam liter. Meningkatnya keahlian masyarakat dalam pembuatan keju susu pada akhirnya dapat yang meningkatkan pendapatan keluarga, keluarga sejahtera.

3. Aneka masakan Ikan, naget, bakso dll

Pengolahan hasil perikanan, khususnya nelayan pantai Klatak desa Keboireng bertujuan meningkatnya keahlian masyarakat di desa dalam mengolah hasil tangkapan ikan menjadi lauk pauk seperti nugget, bakso ikan dll. Tidak hanya itu, menurut ibu Lilis (ketua PKK Desa

Keboireng) bahwa kegiatan pelatihan itu juga meningkatkan pendapatan bagi para pedagang di pantai Klatak dan Gemah. Kurang lebih perminggunya, bisa meraih pendapatan bersih 1.500.000 rupiah, hingga 2.000.000 rupiah saat kondisi ramai.

Keahlian masyarakat dalam membuat naget, bakso ikan memberikan nilai tambah yaitu dikonsumsi secara cepat, tahan lama. Hasil tangkapan ikan yang pada umumnya dijual kiloan perkilo berkisar 15 sd 30 ribu rupiah, dan jika tidak laku, maka ikan akan membusuk, dengan ikan diolah akan memberikan nilai jual dalam jangka waktu pakai lebih panjang. Selain itu ikan pada umumnya dijual murah, karena menjadi makanan cepat saji, maka harganya lebih meningkat. Artinya nilai jual naget, bakso ikan akan meningkat 4x lipat dibandingkan dengan dijual ikan biasa. Meningkatnya keahlian masyarakat dalam pembuatan olahan ikan, naget maupun bakso pada akhirnya dapat yang meningkatkan pendapatan keluarga, masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Pelatihan pemanggangan ikan juga memberikan kualitas ikan panggang yang lezat sehingga diminati oleh konsumen pengunjung pantai Klatak dan Gemah Tulungagung. Sebagaimana pelatihan yang dilakukan oleh Fitri, Sulistyarini dan Windarti bahwa pelatihan pembuatan sosis, keju susu bermanfaat untuk pemberdayaan perempuan/Ibu Tunggal menjadi ibu tangguh, peningkatan keterampilan usaha, serta penyediaan sosis dan keju halal, sehat dan bergisi bagi umat.(Fitri et al., 2020)

4. Pelatihan pembuatan biogas

Pengolahan kotoran limbah peternakan menjadi biogas memiliki tujuan berupa meningkatnya keahlian masyarakat di desa dalam mengolah limbah ternak yang tidak bernilai menjadi bio gas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Keahlian masyarakat terkait pembuatan biogas memberikan nilai tambah yaitu dapat

digunakan untuk memasak. Selain itu limbah pada umumnya ditaruh di ladang untuk pupuk kandang, masa pakainya lama, maka dengan dibuat biogas, nilai ekonomisnya lebih besar. Masyarakat tidak lagi keluar uang untuk beli gas seharga 20 ribu rupiah, per tabung 3 kg. Meningkatnya keahlian masyarakat dalam membuat biogas pada akhirnya masyarakat dapat mengurangi pengeluaran, bisa menabung.

5. Pelatihan pembuatan Gazebo

Pelatihan pembuatan gazebo berbahan pring petung bermanfaat bagi meningkatnya keahlian masyarakat di desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo dalam mengolah pring petung agar memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi masyarakat. Pada umumnya pohon pring petung dijual batangan oleh warga sehingga nilai jual rendah. Jika sudah dimodifikasi menjadi gazebo, maka nilai manfaatnya lebih besar. Namun demikian menurut bapak Agil, Kades Mulyosari, pembuatan gazebo belum dilakukan secara berkelanjutan karena permintaan pasar yang rendah. Mungkin disebabkan oleh harga gazebo yang mahal. Yang sekarang terus berkembang karena permintaan pasar bagus yaitu pembuatan rak bunga, kursi bambu.

E. Analisis peningkatan ekonomi Desa dan tindak lanjut

Program sinandu dilaksanakan atas fasilitasi Dinas PMD menghubungkan antara sector usaha masyarakat dengan dinas Propinsi Jawa Timur tahun 2020. Dengan sinandu masyarakat desa memiliki keahlian tambahan untuk melanjutkan usahanya agar bisa berkesinambungan. Tindak lanjut terhadap ketrampilan yang telah dimiliki merupakan kesadaran yang muncul dari masyarakat. Produksi akan jalan tidak saja berangkat dari keahlian yang telah dimiliki semata, melainkan masyarakat harus mampu mengembangkan termasuk upaya memasarkan produk. Berikut yang diperlukan dalam rangka tindak lanjut sinandu:

1. Pengolahan jeruk menjadi kemasan jeruk siap saji

Berkat pelatihan pengolahan jeruk kemasan maka masyarakat memiliki keahlian mengolah hasil kebun jeruknya. Namun demikian menurut bapak Kades Desa Samar, keahlian tersebut belum dimanfaatkan oleh warga untuk produksi yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena tanaman jeruk tidak maksimal karena curah hujan yang terlalu tinggi. Diperlukan penguatan pada budidaya jeruk yang tahan cuaca dan curah hujan.

2. Pengolahan Keju susu

Susu perahan yang diolah menjadi keju susu menjadi satu kemajuan di masyarakat. Keahlian yang telah diperoleh perlu dikembangkan sehingga keahlian dapat berkembang. Namun demikian, menurut bapak Kades Desar Samar Pagerwojo, keahlian ini belum dimanfaatkan untuk dikembangkan. Perlu ada pelatihan-pelatihan lanjutan agar warga memiliki keberanian untuk memproduksi hasil susu perah untuk diolah menjadi keju susu yang siap dipasarkan.

3. Usaha keju susu akan berkembang jika didorong oleh stakeholder terkait, diantaranya mendorong warga untuk melatih diri agar keahlian pembuatan keju susu benar-benar dimiliki warga dan yakin bahwa produknya layak jual. Secara teknis jika keahlian sudah berjalan maka diperlukan keberpihakan pengurusan legalitas. Pemasaran bisa dibantu setidaknya oleh BUM Desa yang memiliki wilayah dari usaha setempat, berjejaring dengan toko-toko dan industry kue di masyarakat. Dinas PMD bekerjasama dengan kominfo telah menyediakan sarana pemasaran pardeso.online. Maka perlu mendaftarkan produk tersebut ke layanan online tersebut.

4. Pengolahan aneka masakan ikan, naget, bakso ikan dan pemanggangan ikan

Menurut ibu Lilis (ketua PKK Desa Keboireng), hasil pelatihan aneka masakan ikan, naget, bakso ikan dan pemanggangan ikan sangat bermanfaat bagi terciptanya keahlian baru bagi peserta pelatihan. Sampai saat ini keahlian tersebut terus dimanfaatkan, khususnya adalah keahlian pemanggangan ikan. Hasil pelatihan membuat kualitas pemanggangan semakin baik, lezat dan aromanya yang menawan. Hasil pelatihan lain, seperti pelatihan naget ikan, bakso ikan, pembuatan krupuk ikan belum melakukan produksi lagi.

5. Pembuatan biogas

Menurut kepala Desa Samar Pagerwojo, pelatihan ini belum ditindaklanjuti sebagai bagian dari bio gas untuk kebutuhan masak bagi peserta pelatihan. (Sulistiyanto et al., 2016; Usman et al., 2020) Kotoran ternak di Desa Samar berlimpah, karena mayoritas masyarakat memiliki Sapi Perah. Ke depan, Bapak Kades menaruh harapan bahwa ketika kotoran hewan berlimpah akan mendapatkan keahlian baru berupa pelatihan pembuatan pupuk organik agar bisa dimanfaatkan oleh mayoritas petani desa Samar, dan berdampak pada pertumbuhan pertanian dan perkebunan. Dari pupuk organik akan menghasilkan pertanian dengan kualitas tinggi, sehat dan bebas kimiawi. Tentu hal ini memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pupuk kimia. Selain itu dengan pupuk organik, rumput bahan makan ternak akan tumbuh subur, sehingga kualitas susu yang diproduksi akan semakin besar.

6. Pembuatan Gazebo

Dinas mendorong agar produk sudah dilatih dipraktikkan dan ditawarkan di pardeso online. Menurut Agil, Kades Mulyorejo, Karena harga Gazebo yang relative tidak dalam jangkauan masyarakat umum,

pembuatan gazebo sesuai pesanan. Sedangkan produk yang berkembang seperti anyaman bambu dan sejenisnya.

F. Daftar Pustaka

- Astuti, A., Roektingrum, E., & Hasanah, H. (2011). Optimalisasi Potensi Peternak Susu Sapi Perah Melalui Penyuluhan Dan Pelatihan Pembuatan Keju Dan Yoghurt Aneka Rasa Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Inotek*, 15(2), 146–154.
- Fitri, N., Sulistyarini, R. I., & Windarti, Y. (2020). Pemberdayaan Perempuan/Ibu Tunggal Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Industri Rumah Tangga Halal Dan Sehat Sebagai Usaha Peningkatan Self Efikasi Diri Dalam Berwirausaha. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art4>
- Putra, D. E., & Ismail, A. M. (2016). Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Sari Buah Jesika (Jeruk Siam Kancil) di Dusun Banjarejo RT 02 RW 08 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dana BOPTN Tahun 2016*, 207–210.
- Ridawati, & Alsihendra. (2021). Pelatihan Pembuatan Minuman Serbuk Kunyit Asam Bagi Masyarakat Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik*, 1(1), 71–85. <https://doi.org/doi.org/10.21009/ABDITEK.011.07>
- Riwayati, I., Hartati, I., & Harianingsih, H. (2018). Pelatihan Pembuatan Keju Lunak Alami Dan Produk Olahannya Bagi Peternak Sapi Di Desa Pengging Kecamatan Banyudono Boyolali. *Abdimas Unwahas*, 3(2), 26–29. <https://doi.org/10.31942/abd.v3i2.2499>

- Salim, C., Wijayanto,D.,& Pramudito, P.(2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan “Cream cheese “Berbahan dasar Santan Sebagai Substitusi. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 2(1),49-54.
- Sulistiyanto, Y., Sustiyah, S., Zubaidah, S., & Satata, B. (2016). Pemanfaatan Kotoran Sapi Sebagai Sumber Biogas Rumah Tangga di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Udayana Mengabdi*, 15(2), 150-158.
- Usman, U., Hasan, H., M, M. H., & Elihami, K. (2020). Pemanfaatan Kotoran Ternak Sebagai Bahan Pembuatan Biogas. *Maspul Journal Of Community Empowerment*, 1(1), 13-20.

BAB VI

ANALISIS PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMD adalah melakukan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dewasa ini perkembangan BUM Desa di setiap wilayah menjadi perhatian tersendiri bagi hampir setiap daerah. Setiap daerah saat ini sedang berkompetisi untuk meningkatkan dan memajukan BUM Desa mereka masing-masing.

Dalam hal ini BUM Desa memiliki keistimewaan bagi pemerintah Desa karena memang mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu juga meningkatkan potensi masyarakat desa itu sendiri. Karena dengan adanya BUM Desa tersebut, peluang dan kesempatan berkarya sesuai dengan kompetensi dan potensi masyarakat sangat terbuka lebar. Keberadaan BUM Desa untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangatlah diperlukan. Karena melalui BUM Desa ini diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh. Hal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, khususnya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, disimpulkan bahwa BUM Desa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa.

Dasar pemikiran pendirian BUM Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas inisiatif masyarakat serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mekanisme berbasis anggota dan perusahaan mandiri. (Ridlwani, 2014)

B. Badan Usaha Milik Desa

Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Edi Yusuf Agunggunanto, dkk menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. (Edi Yusuf Agunggunanto, 2016)

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun hasil yang diperoleh belum sesuai ekspektasi. Salah satu penyebab yang paling dominan adalah intervensi yang terlalu besar oleh pemerintah. Akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan yang belum berjalan efektif dapat berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. (Zulkarnaen, 2016) Berdasarkan asumsi tersebut maka lahirlah Undang-Undang dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa dengan cara melakukan inovasi dan pengembangan dalam pembangunan desa melalui pembentukan BUM Desa. Dimana

dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dari BUM Desa tersebut didukung oleh pemerintah desa dan masyarakat sekitar.

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada masyarakat desa sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Perkembangan tersebut haruslah berupa metamorfose sosial-ekonomi dan budaya yang wajar, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan desa haruslah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi, "*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" (DPR RI, 2014) Berdasarkan pasal tersebut, maka pengurusan dan pengembangan desa menjadi kewenangan desa sendiri. Pembangunan pedesaan tentunya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, melainkan untuk pembangunan manusia, unsur-unsur ekonomi juga memegang peranan penting. Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. (DPR RI, 2014)

Sedangkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa”. (RI, 2004) Hal tersebutlah yang menjadi landasan berdirinya BUM Desa di masing-masing wilayah. Sedangkan pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Badan Usaha Milik Desa disingkat menjadi BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Rahmawati, 2020).

C. Bentuk Pemberdayaan Dinas PMD

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas PMD Tulungagung sebagaimana dalam 9 aksi (kegiatan) yang disampaikan oleh (R. Satriadi, Kasi Lembaga dan Usaha Ekonomi Pedesaan) antara lain:

1. Mapping BUM Desa.

Identifikasi pendataan BUM Desa di desa dalam rangka menggali apakah setiap desa sudah dibentuk BUM Desa atau belum. Seluruh desa sudah dibentuk semua. Pengelolaan BUM Desa baru taraf membentuk saja, pengelolaan sepenuhnya belum maksimal.

2. Fasilitasi pembentukan BUM Desa berupa pendampingan langsung. Setelah dibentuk BUM Desa, disusun regulasi. Legalitas BUM Desa dinyatakan legal,

bila sudah adanya Peraturan Desa (PERDES), SK dari kepala Desa, dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT). Semua BUM Desa sudah punya AD RT. Namun kondisinya tidak dilegalkan ke notaris, belum berbadan hukum. Sementara yang dinotariskan adalah unit usahanya.

3. Peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa melalui pelatihan, Bimbingan Teknis (BIMTEK) di tingkat Kecamatan, Kabupaten berupa pembinaan peningkatan kapasitas BUM Desa. Mengundang pelaksana BUM Desa, pengawas dan penasehat (Kepala Desa). Untuk melaksanakan pembinaan diundang narasumber yang berkompeten, kerjasama dengan perbankan, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Pelatihan di Nangkula Park pada Maret 2021 (BUM Desa kategori pemula).
4. Pengembangan unit usaha BUM Desa, unit usaha yang bisa dikembangkan di desa bersangkutan, untuk menggali potensi di desa. Di bentuk unit usaha BUM Desa. Potensi alam bagus jadi wisata, misal Desa Kendal Bulur, Nangkula Park. Dengan hadirnya wisata desa, kuliner nya dikelola oleh BUM Desa sehingga membangun ekonomi masyarakat.
5. Membangun jejaring BUM Desa. Proses kebijakan dengan propinsi membantu meningkatkan kapasitas, pengembangan BUM Desa agar tidak stagnan, kita juga membentuk forum komunikasi Kecamatan, forum BUM Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, rujukan di forum BUM Desa di tingkat propinsi. Saat ini yang sudah jalan dari forum BUM Desa Kecamatan, yaitu Ngunut, Sumbergempol. Forum BUM Desa Kecamatan berfungsi untuk saling mengingatkan, mengkoreksi, agar tidak hanya nama saja. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian desa. Membuat lowongan kerja ke masyarakat. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

6. BUM Desa dikelola agar berkembang, dari sisi penganggaran agar bisa operasional, agar bisa mendapat keuntungan. BUM Desa dibantu dari pemerintah desa (optimalisasi dana desa), seikhlasnya desa mengalokasikan. Pada realisasinya, anggaran BUM Desa nunggu *turahan* (sisa). Kita sudah surati untuk pengelolaan BUM Desa, agar difokuskan pada peningkatan permodalan BUM Desa yang dialokasikan dari dana desa. Dana desa yang sebelumnya untuk pembangunan fisik, kita arahkan ke pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa. Dari anggaran dana desa digunakan untuk penyertaan modal BUM Desa. Penyertaan modal BUM Desa akan diterimakan BUM Desa, bila BUM Desa sebelum APBDes diputuskan, BUM Desa telah mengajukan proposal untuk pengajuan penyertaan modal ke desa disertai analisis kelayakan usaha. Kenyataannya tidak semuanya jalan seperti ini. Sering kita lakukan monev, jalan mampir ke desa, BUM Desa kelihatan tidak membuat proposal, namun Dana Desa cair untuk modal BUM Desa. Desa harus membuat PERDES penyertaan modal.

Bagi Desa tertentu kesadaran untuk mengembangkan BUM Desa mendapat respon bagus. Menurut Anang (Kades Kendal Bulur) tahun 2020 Desa memberikan penyertaan modal sebesar 50 juta rupiah ke BUM Desa Larasati. Tahun 2021 Desa membangun kelengkapan Nangkula Park senilai 198 juta rupiah dan 98 juta rupiah yang diperuntukkan untuk Parkiran, limas, paving, kanopi atap mainan anak-anak.

Menurut Zaeni Hamdi, Bendahara BUM Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan menuturkan, permodalan BUM Desa adalah tahun 2016 sebesar 20.000.000 rupiah dari dana desa, tahun 2017 sebesar 65.000.000 rupiah dari dana JALINMATRA propinsi Jawa Timur, tahun 2018 sebesar 25.000.000 rupiah dari dana desa, tahun 2021 sebesar 30.000.000 rupiah dari dana desa.

Menurut Joko Ibrahim (BUM Desa Ngudi Sejahtera Ngunut), Modal awal BUM Desa yang diberikan oleh desa tahun 2018 sebesar 25.000.000 rupiah, 2019 sebesar 60.000.000 rupiah, tahun 2021 sebesar 60.000.000 rupiah.

7. Pengembangan BUM Desa adalah menjadi BUM Desa Bersama di tingkat kecamatan yaitu eks PNPM, BUM Desa Bersama kawasan kecamatan Pucanglaban, Sendang dan Ngantru. (tupoksi p Mujianto).
8. Fasilitasi BUM Desa dilakukan dengan BIMTEK Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BUM Desa, kerjasama dengan BPKP Propinsi. Sudah tersedia aplikasi, namun masih proses penyesuaian, belum maksimal, masih ada eror, perlu dibenahi. Proses install setiap aplikasi kadang ada error. Pelaporan BUM Desa rencananya kita seragamkan terkait administrasi pembukuan. Sementara masih belum terlaksana. Kemarin BIMTEK di tingkat kecamatan, rencana setelah ini pelatihan lagi. Sementara ini pelaporan sesuai dengan kemampuan masing-masing BUM Desa. Ke SIA BUM Desa pun harus ada pembukuan manual.
9. Membentuk klinik BUM Desa. Arahnya klinik/konsultasi, bisa melalui forum kecamatan untuk melihat apa karena pengelola tidak maksimal, atau karena factor desanya. Hal ini jangan sampai terjadi permasalahan, dan transparan. Penyertaan modal dari kas desa, diserahkan ke BUM Desa harus melalui transfer dan bisa dibuktikan yaitu bukti penerimaan uang. Hal ini menjaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan melalui transfer ke rekening. Tupoksi kita hanya di BUM Desanya.
10. *Market Place* BUM Desa dan kemitraan dengan pihak ketiga. *Market place* belum di *lounching* berupa pasar deso untuk pemasaran produk unggulan desa yang dikelola BUM Desa. Kerjasama dengan pihak ketiga ke

Bank Jatim, program lakupandai (tingkat pembayaran listrik, PBB) direncanakan juga kendaraan bermotor. Masih proses PKS (8 BUM Desa yang telah mendatangi PKS; Desa Kendalbulur, Karangrejo Boyolangu, Ngunut, Jabalsari, Ngebong, Karanganom, BUM Desa Gemah Ripah, BUM Desa Makmur Sejahtera, BUM Desa Berkah Utama) dan Gondang BUM Desa bersama. Propinsi juga ada kegiatan ini namanya samsat Bunda.

BUM Desa maju sebanyak 65 BUM Desa, 97 BUM Desa berkembang, BUM Desa pemula sebanyak 95, jumlah total BUM Desa sebanyak 257 Desa. Maju tidaknya BUM Desa diklasifikasikan berdasar data desa center per April 2021. Maju karena administrasi lengkap (legalitas, permodalan, unit usaha, keuntungan).

Keuntungan BUM Desa diatur dalam ADRT yaitu kembali ke modal BUM Desa, honor pengelola dll. Persentase honor pengelola bagi masing-masing BUM Desa berbeda sesuai kemampuan BUM Desa.

Penunjukan pengelola BUM Desa dari desa. Permodalan BUM Desa kita usulkan dari propinsi berdasarkan data center, untuk pendanaan penyertaan dana BUM Desa, bantuan keuangan khusus 8 Desa tahun 2021 (Desa Banyu urip Kalidawir, Desa Kendalbulur (hadiah dari pak Menteri ke Nangkula Park dari kementerian, kepala DPMPD propinsi menjanjikan tahun depan dapat), Desa Picisan Sendang, Desa Mulyasari Pagerwojo, Desa Tiyudan Gondang, Desa Karanganom Kauman, Desa Karangrejo Boyolangu, Desa Samir) , 3 desa pada tahun 2020 (Desa Gambiran Pagerwojo, Desa Keboireng Besuki, Desa Sebalor Bandung).

D. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama)

BUM Desa Bersama disampaikan oleh (Mudjianto, Kasi Kawasan Perdesaan) ada 2, yaitu BUM Desa Bersama transformasi eks PNPM, ada 13 kecamatan, modal PNPM dulu menjadi BUM Desa Bersama, kerjasamanya dengan kecamatan. Kedua, BUM Desa Bersama kawasan, bisa

dibentuk 2 desa atau lebih, saat ini ada 3 kecamatan yang terbentuk, Pucanglaban, Ngantru, Sendang. Yang lainnya belum terbentuk karena program KEMENDES, kawasan ini dari kepala desa, kerjasamanya kurang maksimal, sehingga tidak membentuk bersama. BUM Desa bersama yang saat ini sudah jalan antara lain Pucang laban dan Ngantru. Yang Sendang sampai saat ini belum jelas kegiatannya. Ngantru mendapat bantuan pasar kawasan, yang terletak di Srikaton, dari KEMENDES tahun 2017. Sampai sekarang keberadaan pasar kawasan belum maksimal, karena yang mempengaruhi pertama modal, bentuk bangunan tertutup, Lapak di dalam. Yang dimuka itu kios. Guna membuka dan meningkatkan ketertarikan masyarakat, dan menarik perhatian pedagang, pengurus ada yang membuat lapak di halaman pasar. Bangunan dari galvalum. Pedagang sayur mayor jualan di depan. Dan juga ada dari warung kopinya dua, yaitu dari warga dan usahanya BUM Desa Padangan.

BUM Desa bersama Kecamatan Pucanglaban, ada pelatihan pembuatan minyak VICO tahun 2020 dan dari pengurus BUM Desa sampai sekrang menindaklanjuti, dikembangkan dengan membuat VICO, secara tradisional dengan fermentasi. Cuma untuk pemasaran, terkendala perizinan produksi sehingga pengemasan belum dipatenkan. Namun demikian sudah ada pemesanan dari Bali, Irian, dan pada saat pesanan itulah maka pengurus memproduksi VICO.

Tindak lanjut dari dinas terhadap pengembangan BUM Desa bersama yaitu menghubungkan dengan pihak terkait, pengurus berusaha mengurus perizinan, prosedur terlalu rumit, mungkin terkendala biaya. Karena desa-desa anggota desa kawasan ini memiliki permasalahan dimana Kepala Desa tidak mau penyertaan modal ke BUM Desa Bersama kawasan.

Permodalan BUM Desa Bersama mestinya penyertaan dari BUM Desa, tapi seperti Pucanglaban, mandiri dari pengurus. Pengembangan pasar Srikaton dari pengurus, belum ada penyertaan dari desa anggota. Ngantru 4 desa kawasan

(Srikaton, Padangan, Pinggirsari, Pucung Lor). BUM Desa Bersama Pucanglaban (Pucanglaban, Kalidawe, Panggungkalak).

Upaya pengembangan dari dinas terhadap BUM Desa bersama yaitu fasilitasi dari dinas, membuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) 5 tahunan. Selain itu Dinas melakukan money 2 kali dalam setahun.

BUM Desa Bersama kawasan dan BUM Desa Bersama eks PNPM berdiri sendiri. BUM Desa Bersama eks PNPM itu akan berubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulungagung memiliki satu BUM Desa Bersama eks PNPM yaitu BUM Desa bersama Kecamatan Sendang. Jumlah total 10 BUM Desa Bersama se propinsi Jawa Timur, yang akan di- *louncing* oleh KEMENDES Nopember 2021. OJK perwakilan Kediri (Tulungagung dan Blitar). BUM Desa bersama kecamatan Sendang asset nya sdh 10 milyar lebih, diantaranya memiliki swalayan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) ditujukan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan. Maka *sustainable development* menjadi sangat erat dengan program pemberdayaan masyarakat ini. (Noor, 2011) Selain memang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang

bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. (Noor, 2011)

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi *alternative* dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literature dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum maksimal dalam implementasinya. Dalam hal pertumbuhan ekonomi di suatu Negara, khususnya di suatu daerah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini seringkali dibicarakan dalam kaitannya dengan kemajuan dan perubahan bangsa. (Noor, 2011)

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Dinas PMD Kabupaten Tulungagung memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Tulungagung sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

E. Peningkatan Ekonomi Desa dari BUM Desa

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjembatani kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dilakukan dengan memproduksi maupun bekerjasama dengan usaha masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan putaran ekonom di desa. Peningkatan ekonomi merupakan satu hal yang sepenuhnya harus dilakukan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Menurut Joko Ibrahim (BUM Desa Ngudi Sejahtera Ngunut) diantara usaha yang dikelola oleh BUM Desa antara lain toko online, warung desa/angkringan, internet. Nah usaha-usaha tersebut menjadi pintu bagi masyarakat untuk memasarkan produk yang dihasilkan, sehingga menjadi minat bagi masyarakat yang lain sebagai konsumen. Menurut Zaeni Hamdi, Bendahara BUM Desa Panjerejo Rejotangan peningkatan ekonomi desa di masyarakat ditunjukkan dari simpan pinjam

yang dikelola untuk membantu permodalan masyarakat usaha kecil/rumah tangga.

Identifikasi ekonomi desa yang meningkat, diketahui melalui survai dan terjun lapangan. Dinas PMD mempunyai anggaran untuk pembinaan dan monitoring (awal, tengah, akhir tahun).

F. Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Desa dan tindak lanjut

BUM Desa pada umumnya mendapatkan sumber dana dari sebagian alokasi dana desa dan dimanfaatkan untuk usaha sehingga menghasilkan pendapatan. Hasil pendapatan BUM Desa sebagaimana peraturan desa setempat, keuntungan akan dialokasikan sebagian untuk pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa tidak saja memastikan bantuan dari alokasi pemerintah, melainkan berupaya membangun kemandirian desa melalui Pendapatan Asli Desa yang disumbangkan ke desa. Berikut kontribusi PAD yang berhasil disumbangkan BUM Desa ke Desa:

Tabel 6.1
Kontribusi BUM Desa menghasilkan PAD

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Bandung	Desa Kesambi	Kesambi Jaya	5.550.000
2	Kecamatan Pucanglaban	Desa Kalidawe	Gondang Legi	40.000.000
3	Kecamatan Ngunut	Desa Balesono	Suko Mukti	2.299.412
4	Kecamatan Ngunut	Desa Samir	Sumber Rejeki	10.932.150
5	Kecamatan Ngunut	Desa Karangsono	Segoro Berkah	303.399
6	Kecamatan	Desa	Sido Mukti	4.000.000

	Ngunut	Kacangan		
7	Kecamatan Ngunut	Desa Gilang	Mekar Sari	9.034.020
8	Kecamatan Sumbergempol	Desa Junjung	Junjung Makmur	10.000.000
9	Kecamatan Sumbergempol	Desa Jabalsari	Makmur Sejahtera	2.500.000
10	Kecamatan Boyolangu	Desa Kendalbulur	Larasati	127.000.000
11	Kecamatan Boyolangu	Desa Tanjungsari	Bangun Desa Sejahtera	633.705
12	Kecamatan Karangrejo	Desa Tanjungsari	Bibit Santoso	3.972.575
13	Kecamatan Karangrejo	Desa Sukorejo	Sukoraharjo	3.228.200
14	Kecamatan Kauman	Desa Karanganom	Sukses Abadi	2.176.500
15	Kecamatan Gondang	Desa Sepatan	Pringgodani	3.603.753
16	Kecamatan Sendang	Desa Picisan	Karya Sembada	1.808.097
				227.041.811

Sumber: Dinas PMD

Tabel 6.1 dapat dideskripsikan bahwa BUM Desa Larasati, Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu sebesar 127.500.000 rupiah pada tahun 2020 (Wahyu, dinas PMD). Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, BUM Desa Bangun Desa Sejahtera memberikan Pendapatan Asli Desa tahun 2020 sebesar 633.705 rupiah. Tindak lanjut keberadaan BUM Desa akan terus ditingkatkan agar memberi manfaat kepada masyarakat dan memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Desa.

Desa Kesambi, BUM Desa Kesambi Jaya berhasil menyumbangkan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2018 sebesar 2.500.000 rupiah, tahun 2019 sebesar 1.800.000

rupiah, dan tahun 2020 sebesar 1.250.000 rupiah (Data dinas PMD Tulungagung).

Desa Kalidawe, BUM Desa Gondang Legi Kecamatan Pucanglaban berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017 sebesar 10.000.000 rupiah, tahun 2018 sebesar 10.000.000 rupiah, tahun 2019 sebesar 10.000.000 rupiah dan tahun 2020 sebesar 10.000.000 rupiah (Data dinas PMD Tulungagung).

Desa Balesono, BUM Desa Suko Mukti sukses menghasilkan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017 sebesar 33.625 rupiah, tahun 2018 sebesar 425.072 rupiah, tahun 2019 sebesar 548.715 rupiah dan tahun 2020 sebesar 1.292.000 rupiah. (Data dinas PMD Tulungagung).

Desa Samir, BUM Desa Sumber Rejeki berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017 sebesar 1.645.200rupiah, tahun 2018 sebesar 2.587.950 rupiah, tahun 2019 sebesar 3.913.500 rupiah dan tahun 2020 sebesar 2.785.500 rupiah. (Data dinas PMD Tulungagung).

Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, BUM Desa Segoro Berkah berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2020 sebesar 303.399 rupiah. Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut BUM Desa Sido Mukti berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2020 sebesar 4.000.000 rupiah (Data dinas PMD Tulungagung).

Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, BUM Desa Mekar Sari berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2018 sebesar 1.196.370 rupiah, tahun 2019 sebesar 2.509.575 rupiah dan tahun 2020 sebesar 5.328.075 rupiah. (Data dinas PMD Tulungagung).

Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, BUM Desa Junjung Makmur berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2020 sebesar 20.000.000 rupiah. Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, BUM Desa Makmur Sejahtera berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2020 sebesar 2.500.000 rupiah. (Data dinas PMD Tulungagung).

Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangrejo, BUM Desa Bibit Santoso berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2019 sebesar 2.031.375 rupiah dan tahun 2020 sebesar 1.941.200 rupiah. Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, BUM Desa Sukoraharjo berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017 sebesar 200.000 rupiah, tahun 2018 sebesar 200.000 rupiah, tahun 2019 sebesar 978.200 rupiah dan tahun 2020 sebesar 1.850.000 rupiah. (Data dinas PMD Tulungagung).

Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, BUM Desa Sukses Abadi berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2018 sebesar 151.500 rupiah, tahun 2019 sebesar 525.000 rupiah dan tahun 2020 sebesar 1.500.000 rupiah. (Data dinas PMD Tulungagung). Desa Sepatan, Kecamatan Gondang, BUM Desa Pringgodani berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017 sebesar 508.200 rupiah, tahun 2018 sebesar 674.170 rupiah, tahun 2019 sebesar 1.105.505 rupiah dan tahun 2020 sebesar 1.315.877,5 rupiah. (Data dinas PMD Tulungagung).

Desa Picisan, Kecamatan Sendang, BUM Desa Karya Sembada berhasil memberikan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017 sebesar 366.878 rupiah, tahun 2018 sebesar 413.850 rupiah, tahun 2019 sebesar 627.319 rupiah dan tahun 2020 sebesar 400.050 rupiah. (Data dinas PMD Tulungagung).

Total Pendapatan Asli Desa yang berhasil di sumbangkan oleh BUM Desa di wilayah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu 4 tahun (2017- 2020) sebesar 227.041.810,5 rupiah atau jika dibulatkan menjadi 227 juta rupiah. Data tersebut terinci pada tahun 2017 sebesar 12.753.903 rupiah, tahun 2018 sebesar 18.148.912 rupiah, tahun 2019 sebesar 24.039.189 rupiah dan tahun 2020 sebesar 172.099.806,5 rupiah. (Data dinas PMD Tulungagung). Peran BUM Desa bisa dimaksimalkan pada tahun-tahun mendatang, mengingat masing-masing Desa telah memiliki anggaran rutin untuk mengembangkan BUM Desa.

G. Daftar Pustaka

- DPR RI. (2014, January 15). *UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. Diambil kembali dari Website Resmi DPR RI : https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Edi Yusuf Agunggunanto, d. (2016, Maret 1). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) . *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara* , 68. Diambil kembali dari e-journal Universitas Diponegoro Semarang: <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395/753>
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Bandung Barat . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Universitas Gunadarma* , 3.
- RI, D. R. (2004). *UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah* . Diambil kembali dari <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) dalam Pembangunan Perekonomian Desa . *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung* , 426 .
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta . *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, UNPAD Bandung*,

BAB VII

ANALISIS PEMBERDAYAAN PASAR DESO TULUNGAGUNG UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN USAHA MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Masyarakat secara umum telah memiliki usaha baik melalui BUM Desa maupun mandiri. Produk yang telah dihasilkan masyarakat membutuhkan sarana pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar. Tidak saja pada market place yang sudah ada, Dinas PMD Kabupaten Tulungagung berupaya untuk memberikan ruang untuk lebih memberikan peluang agar produk masyarakat lebih luas dikenal dan dibeli oleh konsumen. Market place yang dibentuk oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Kominfo menghasilkan layanan pasar secara online. Penelitian Pramudita menunjukkan bahwa promosi di Instagram dengan marketing mix yaitu konten campaign maupun konten produk tidak berpengaruh terhadap penjualan, baik simultan maupun parsial.(Pramudita, 2019) Kondisi ini membutuhkan sarana marketing lain layaknya yang diinisiasi oleh dinas PMD berupa pasar deso Tulungagung. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ayuni, Cangara dan Arianto bahwa ada hubungan positif antara penggunaan media digital terhadap tingkat penjualan produk kuliner kemasan.(Ayuni et al., 2019)

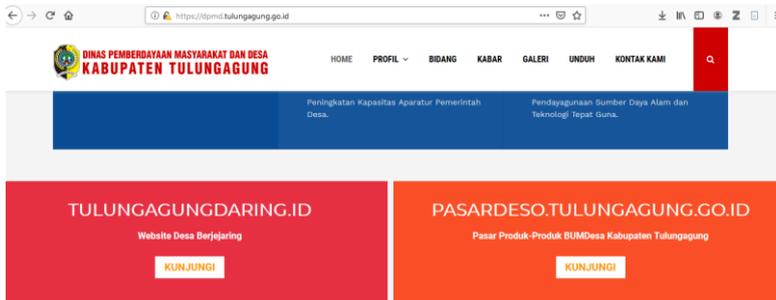
Market place pasar deso online memiliki harapan diantaranya adalah pertama, memberikan alternatif pada BUM Desa Untuk mengembangkan usaha melalui marketplace yang dimiliki sendiri dengan tetap membuka ruang berkolaborasi dengan marketplace yang sudah berkembang. Kedua, memberikan ruang pada BUM Desa untuk berkontribusi untuk memberdayakan usaha mikro di

Desa. Ketiga, memberikan pengenalan serta Pembiasaan pada BUM Desa dan Masyarakat tentang potensi, tantangan, peluang dan keniscayaan kebutuhan terhadap perkembangan ekonomi digital.

Pasar deso online ini diharapkan benar-benar menjadi penghubung antara produk masyarakat, BUM Desa sehingga menumbuhkan ekonomi di masyarakat. Jika barang produksi laku di pasaran, maka produsen akan terus memproduksi barang, dan mampu menyerap tenaga kerja lebih luas. Lebih dari itu, perputaran ekonomi akan lebih luas karena seiring target produksi yang besar, maka akan muncul sinergi dengan lembaga keuangan baik perbankan, koperasi maupun yang lainnya.

B. Pasar Deso Tulungagung

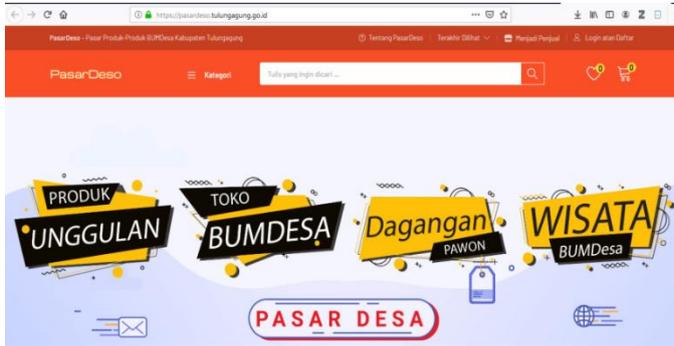
Pasar Deso Online yang diinisiasi oleh Dinas PMD memiliki akun pasardeso.tulungagung.go.id yang bisa di akses dalam akun <https://dpmd.tulungagung.go.id/>. Berikut tampilan akun pasar deso online pada website dinas PMD kabupaten Tulungagung:



Gambar 7.1
Akun Pasar Deso Online
Sumber: dinas PMD Tulungagung

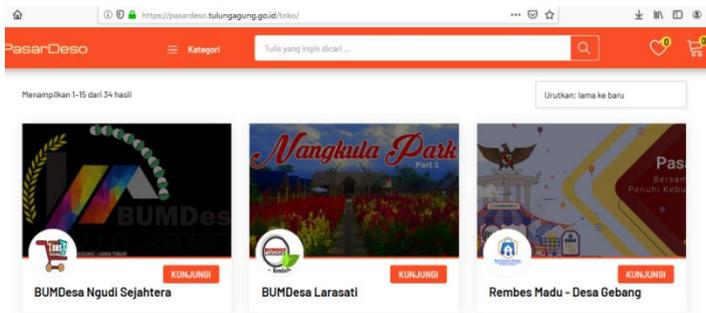
Akun tersebut bisa diakses secara online dari semua layanan internet sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk bisa akses baik sebagai penjual atau pembeli.

Akun pasar deso Tulungagung memiliki beberapa fitur diantaranya adalah ragam produk unggulan BUM Desa, BUM Desa mart toko e BUM Desa, tempat wisata e BUM Desa dan dagangan pawon BUM Desa. Fitur tersebut tampak sebagai berikut:



Gambar 7.2
Fitur pasar deso Tulungagung
Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Fitur pada gambar 7.2 memuat berbagai produk, toko, dagangan hingga wisata yang dikelola oleh BUM Desa. Tercatat pada akun tersebut sebanyak 34 BUM Desa yang sudah mendaftarkan diri dalam produk unggulan BUM Desa. Berikut tampilan BUM Desa yang telah mendaftarkan produk unggulannya di pasar deso tulungagung:

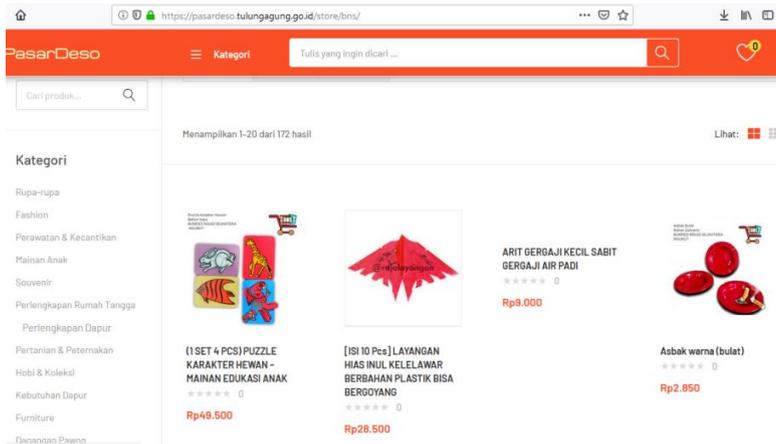


Gambar 7.3
BUM Desa yang telah mendaftarkan produk unggulan
Sumber: dinas PMD Tulungagung

Diantara 34 BUM Desa tersebut antara lain; BUM Desa Ngudi Sejahtera, BUM Desa Larasati, Rembes Madu-Desa Gebang, BUM Desa Gemah Ripah, BUM Desa Suko Raharjo, BUM Desa Suko Makmur, BUM Desa Srikandi, BUM Desa Handayani, BUM Desa Makmur Sejahtera, BUM Desa Junjung Makmur, BUM Desa Berkah Kamardikan, BUM Desa Bina Sukses Mandiri, BUM Desa Tunggul Sayekti, BUM Desa Usaha mulia, Desa Mart, Karya Wilis, BUM Desa Banjar Mulyo, BUM Desa Sukses Makmur, BUM Desa Kedung Padang, BUM Desa Sido Makmur, BUM Desa Karya Sembada, BUM Desa Sukses Abadi, BUM Desa Luhur Abadi, BUM Desa Mekar Lestari, BUM Desa Sumber mulyo, BUM Desa Maju Jaya, BUM Desa Sumber Rejeki, BUM Desa Gumregah, Sinar Harapan, BUM Desa Lentera Harapan, BUM Desa Seruja, BUM Desa Sumbermulyo, Perkumpulan Penggerak Inovasi Nusantara, BUM Desa Gayuh Sandang Pangan. (Pardeso.online. diakses 29 Juni 2021)

Produk Unggulan BUM Desa Ngudi Sejahtera

Masing-masing produk unggulan BUM Desa secara acak dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 7.4
 Produk unggulan BUM Desa Ngudi Sejahtera Desa Ngunut
 Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Gambar 6.3 telah menampilkan 172 hasil. Produk tersebut yang berhasil dikelola BUM Desa Ngudi Sejahtera Desa Ngunut. Masing-masing produk yang ditawarkan sudah tampak harga, sehingga menjadi bahan pemikiran bagi konsumen untuk menyesuaikan dengan keuangan yang dimiliki, termasuk membandingkan dengan berbagai harga dengan barang sejenis atau substitusi barang sejenis. Produk lainnya seperti berikut:

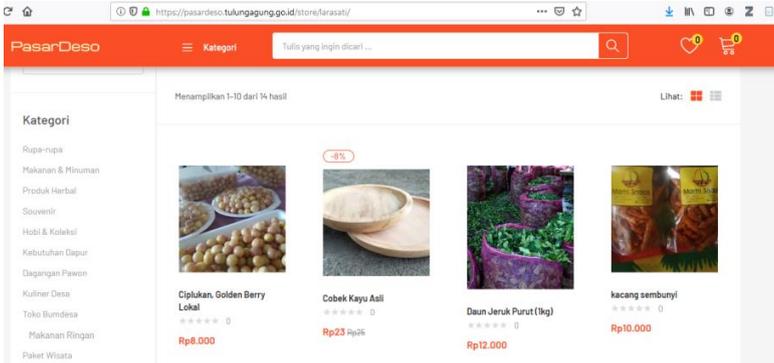


Gambar 7.5
 Produk Lain BUM Desa Ngudi Sejahtera Ngunut
 Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Masih banyak lagi produk lain yang bisa menjadi sarana penjualan produk dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Produk Unggulan BUM Desa Larasati

Pasar deso Tulungagung memuat 14 produk BUM Desa Larasati. Diantara produk tersebut sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 7.6
 Produk unggulan BUM Desa Larasati
 Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Sebagaimana gambar 7.6 produk unggulan yang tertera pada pasar deso online diantaranya ciplukan, cobek kayu, daun jeruk purut, kacang sembunyi dll. Masing-masing harga tertera pada setiap produk sehingga memudahkan konsumen untuk membeli. Produk lain diantaranya:

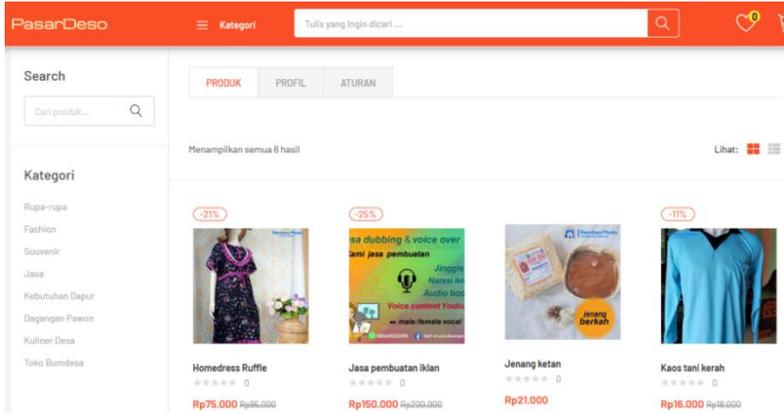


Gambar 7.7
 Produk unggulan lainnya BUM Desa Larasati
 Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Gambar 7.7 menunjukkan bahwa produk unggulan lainnya BUM Desa Larasati antara lain kripik usus home made, Kripik kulit patin, Madu Mongso, Nugget Ikan lele. Dan masih tersedia produk lainnya pada BUM Desa larasati.

Produk Unggulan Rembes Madu-Desa Gebang

Produk unggulan BUM Desa rembes Madu yang merupakan BUM Desa Desa Gebang menampilkan 6 produk. Diantara produk tersebut antara lain:



Gambar 7.8
Produk Unggulan Rembes Madu-Desa Gebang
Sumber Dinas PMD Tulungagung

Gambar 7.8 menampilkan produk unggulan BUM Desa Rembes madu antara lain homedres ruffle, jasa pembuatan iklan, Jenang ketan, Kaos tani kerah. Produk unggulan tersebut dilengkapi dengan daftar harga. Produk unggulan lainnya sebagai berikut:

-11%



Kaos tani oblong

★★★★★ 0

Rp16.000 ~~Rp18.000~~



Madu mongso

★★★★★ 0

Rp18.000

Gambar 7.9
Produk unggulan lainnya Rembes Madu
Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Gambar 7.9 menunjukkan bahwa produk unggulan lain BUM Desa Rembes Madu adalah kaos tani oblong dan Madu Mongso.

Produk Unggulan BUM Desa Gemah Ripah

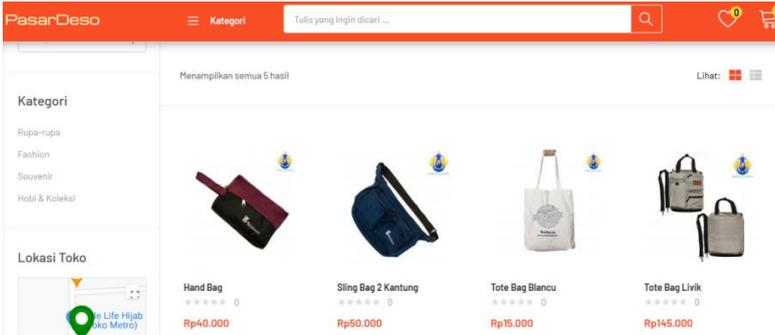
Pada BUM Desa Gemah Ripah belum menampilkan produk unggulan pada pasar deso Tulungagung. Hal itu tampak pada laman website pasar deso.

Produk Unggulan BUM Desa Suko Raharjo

BUM Desa Suko Raharjo belum menampilkan produk unggulan pada pasar deso Tulungagung. Hal itu tampak pada laman website pasar deso.

Produk Unggulan BUM Desa Suko Makmur

BUM Desa Suko Makmur menampilkan 5 produk yang diinisiasi yang masuk pada pasar deso Tulungagung. Adapun produk tersebut antara lain:



Gambar 7.10
Produk unggulan BUM Desa Suko Makmur
Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Lima produk yang ditawarkan BUM Desa Suko makmur antara lain hand bag, sling bag 2 kantong, Tote bag blancu, tote bag livik dan waist bag. Adapun produk Waist bag sebagai berikut:



Gambar 7.11
Produk Waist bag
Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Produk-produk tersebut sudah dilengkapi dengan harga untuk tiap produknya.

C. Bentuk Pemberdayaan Dinas PMD

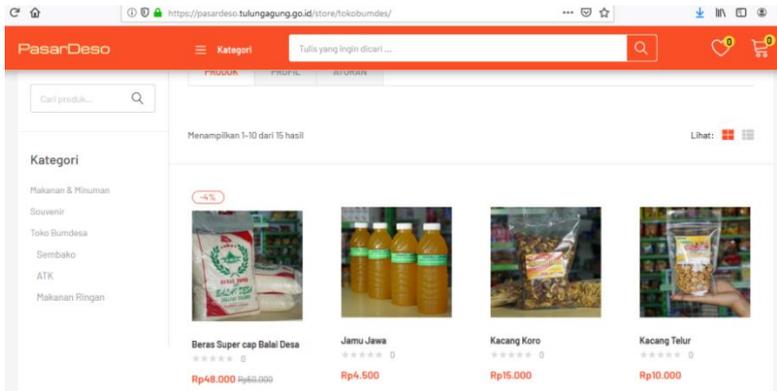
Ada tim pelatihan online 3 kali, tatap muka satu kali di Nangkula Park pada bulan Maret 2021 dengan tema bimbingan teknik market place pasar deso yang ikuti oleh 45 BUM Desa. Syarat BUM Desa memiliki akun pardeso dengan BUM Desa mengajukan permohonan akun BUM Desa ke dinas PMD. Kerjasama dengan Kominfo dan yang membuat fitur pihak ketiga didanai oleh Dinas melalui APBD.

Fitur Toko BUM Desa

Pasar deso Tulungagung menampilkan fitur Toko BUM Desa. Toko BUM Desa tersedia sejumlah 42 toko BUM Desa antara lain: BUM Desa Lestari Bangunjaya, BUM Desa Larasati, BUM Desa Sinar Mulya, BUM Desa Berkah Utama, BUM Desa Gemah ripah, BUM Desa Mulia Mandiri, BUM Desa Suko Makmur, BUM Desa Srikandi, BUM Desa Srikandi Pucunglor, BUM Desa Handayani, BUM Desa Makmur Sejahtera, BUM Desa Junjung Makmur, BUM Desa Karya Sejahtera, BUM Desa Bina Sukses Mandiri, BUM Desa Maju Mapan, BUM Desa Restu Majan, BUM Desa Cakra Usaha, Desa Mart, BUM Desa Berkah Berseri, BUM Desa Sari Mulyo, BUM Desa Banjar Mulyo, Barakah, BUM Desa Kedung padang, BUM Desa Sido Makmur, BUM Desa Lestari Suruhan Kidul, BUM Desa Karya Sembada, BUM Desa Sukses Abadi, BUM Desa Luhur Abadi, BUM Desa Maju Mapan Ngobalan, BUM Desa Sumber Mulyo, BUM Desa Maju Jaya, BUM Desa Sumber Rejeki, BUM Desa Gumregah, BUM Desa Sejahtera Mandiri Desa Sanggrahan, Sinar Harapan, BUM Desa Lentera Harapan, BUM Desa Rejo Makmur, BUM Desa Seruja, BUM Desa Gadung Melati, BUM Desa Sumbermulyo, BUM Desa Gayuh Sandang Pangan. (pasar deso Tulungagung, diakses 29 Juni 2021).

Toko BUM Desa Lestari Bangunjaya

Toko BUM Desa Lestari Bangunjaya menyediakan 15 produk sebagai berikut:

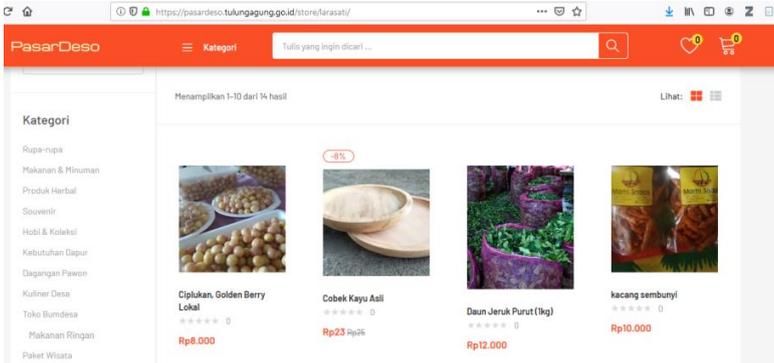


Gambar 7.12
Barang penjualan toko BUM Desa Lestari Bangunjaya
Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Barang yang dijual pada toko BUM Desa Lestari Bangunjaya sebagaimana gambar 7.12 adalah Beras Super cap balai desa, Jamu Jawa, Kacang koro, Kacang telur. Produk tersebut dilengkapi dengan harga yang ditawarkan. Dan masih 14 lagi produk yang ditawarkan BUM Desa Lestari Bangunjaya, bisa diakses melalui website pasar deso Tulungagung.

Toko BUM Desa Larasati

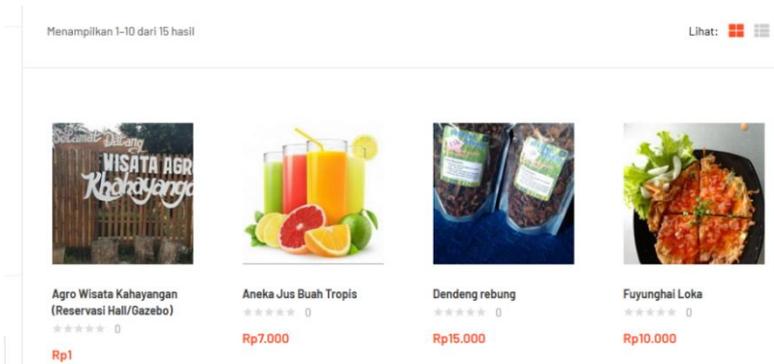
Toko BUM Desa Larasati menjual semua produk unggulan yang dimiliki oleh BUM Desa Larasati. Produk tersebut antara lain:



Gambar 7.13
 Produk yang dijual pada toko BUM Desa larasati
 Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Toko BUM Desa Sinar Mulya

Toko Sinar Mulya yang beralamatkan di Jalan Raya Pagerwojo menawarkan 15 produk pada pasar deso. Diantara produk tersebut seperti susu sapi segar, Sweet red velved, soup buah, salad buah, nila bakar/goring, Mie koyah, Sweet taro, tahu petis, telur penyet, Tumini (tumpeng mini) tumpeng lokahayangan dan selebihnya:



Gambar 7.14
 Produk yang dijual pada toko BUM Desa Sinar Mulya
 Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Toko BUM Desa Berkah Utama

Toko BUM Desa Berkah Utama terletak di desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu. Produk yang dipasarkan:

Menampilkan semua 4 hasil

Lihat:  



Jamu Tradisional

★★★★★ 0

Rp10.000



Sewa Kostum Drumband

★★★★★ 0

Rp50.000



Sewa Kostum Mayoret

★★★★★ 0

Rp150.000



Sewa Sepatu Mayoret

★★★★★ 0

Rp50.000

Gambar 7.15

Produk yang dijual pada toko BUM Desa Berkah Utama

Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Toko BUM Desa Gemah ripah

BUM Desa Gemah ripah terletak di Bono Kecamatan Boyolangu belum menawarkan produk pada pasar deso.

Toko BUM Desa Mulia Mandiri

Toko BUM Desa Mulia Mandiri terletak di Jl. Kanigoro, Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat, Tulungagung, Dekat Balai Desa Campurdarat, Tulungagung, Jawa Timur Indonesia – 66272. Terdapat 3 produk yang ditawarkan pada pasar deso adalah:

Menampilkan semua 3 hasil



[1Kg] Gula Pasir

★★★★★ 0

Rp12.000



[5Kg] Beras Cap 3T

★★★★★ 0

Rp49.000 Rp50.000



Sandal Pearl Swallow Hitam

★★★★★ 0

Rp11.000 Rp13.000

Gambar 7.16

Produk yang dijual pada toko BUM Desa Mulia Mandiri

Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Toko BUM Desa Suko Makmur

Toko BUM Desa Suko Makmur terletak di Dusun Kromasan, RT 02 / RW 02, Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur Indonesia – 66292. Produk yang ditawarkan sebagai berikut:

Menampilkan semua 5 hasil

Lihat: 



Gambar 7.17
Produk yang dijual pada toko BUM Desa Suko Makmur
Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Toko BUM Desa Srikandi

Toko BUM Desa Srikandi terletak di Jl. Raya Tunggangri, Tulungagung, Jawa Timur Indonesia – 66281. Produk yang ditawarkan antara lain baju kekinian, gamis Dres, Rajut Knit premium, Sarkoci junior. Adapun produk tersebut antara lain:

Menampilkan semua 4 hasil

Lihat: 



Gambar 7.18
Produk yang dijual pada toko BUM Desa Srikandi
Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Toko BUM Desa Srikandi Pucunglor

Toko BUM Desa Srikandi Pucunglor terletak di Desa Pucunglor RT002/RW002, Tulungagung, Jawa Timur Indonesia – 66252. Produk yang ditawarkan pada pasar deso ditemukan 8 produk yaitu Ampok goreng mak nyuss, brambang goreng, bunga red lipstick, daun salam, ikat rambut, konektor berpita, konektor polos, masker non medis. Diantara produk tersebut seperti pada gambar berikut:

Menampilkan semua 8 hasil

Lihat:  



Ampok Goreng Mak Nyossss

★★★★☆

Rp10.000



BRAMBANG GORENG

★★★★☆

Rp15.000



BUNGA RED LIPSTIK

★★★★☆

Rp30.000



DAUN SALAM / Syzygium polyanthu

★★★★☆

Rp15.000

Gambar 7.19

Produk yang dijual pada toko BUM Desa Srikandi Pucunglor

Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Toko BUM Desa Handayani

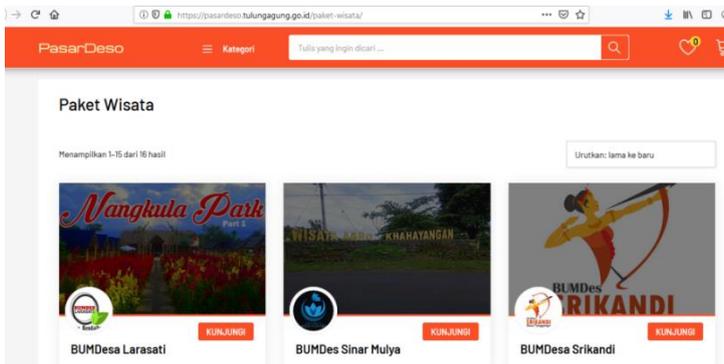
Toko BUM Desa Handayani terletak di desa Tawangsari. Toko ini belum menawarkan produk pada pasar deso.

Masih banyak toko yang sudah terdaftar di pasar deso diantaranya toko BUM Desa Makmur Sejahtera, Toko BUM Desa Junjung Makmur, Toko BUM Desa Karya Sejahtera, Toko BUM Desa Bina Sukses Mandiri, Toko BUM Desa Maju Mapan, Toko BUM Desa Restu Majan, Toko BUM Desa Cakra Usaha, Toko Desa Mart, Toko BUM Desa Berkah Berseri, Toko BUM Desa Sari Mulyo, Toko BUM Desa Banjar Mulyo, Toko Barakah, Toko BUM Desa Kedung padang, Toko BUM Desa Sido Makmur, Toko BUM Desa Lestari Suruhan Kidul, Toko

BUM Desa Karya Sembada, Toko BUM Desa Sukses Abadi, Toko BUM Desa Luhur Abadi, Toko BUM Desa Maju Mapan Ngobalan, Toko BUM Desa Sumber Mulyo, Toko BUM Desa Maju Jaya, Toko BUM Desa Sumber Rejeki, Toko BUM Desa Gumregah, Toko BUM Desa Sejahtera Mandiri Desa Sanggrahan, Toko Sinar Harapan, Toko BUM Desa Lentera Harapan, Toko BUM Desa Rejo Makmur, Toko BUM Desa Seruja, Toko BUM Desa Gadung Melati, Toko BUM Desa Sumbermulyo, Toko BUM Desa Gayuh Sandang Pangan.

Fitur Tempat Wisata e BUM Desa

Pasar deso Tulungagung menampilkan tempat wisata yang dikelola oleh BUM Desa sebanyak 16 Wisata. BUM Desa memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk menjadikan ruang yang tersedia untuk dijadikan tempat wisata. Wisata ini menjadikan putaran ekonomi bagi masyarakat, tersedianya lapangan kerja baru baik sebagai pengelola wisata, kuliner hingga hasil alam di sekitar dipasarkan pada wisata yang dibuat. UMKM tumbuh dengan baik karena hasil produksinya berkesempatan dipasarkan pada area wisata. Diantara 16 tempat wisata tersebut antara lain:



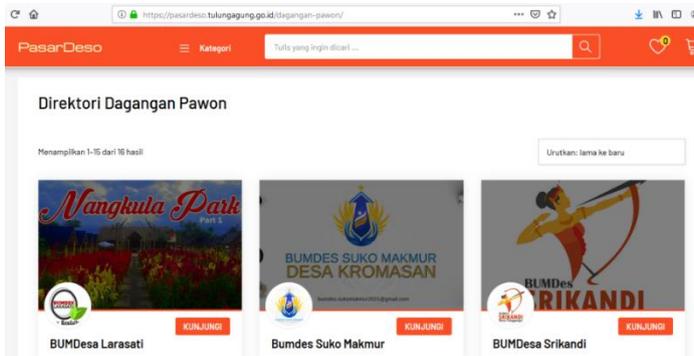
Gambar 7.20

Tempat Wisata e BUM Desa pada pasar Deso Tulungagung
Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Gambar 7.20 menampilkan tempat wisata BUM Desa yaitu BUM Desa Larasati, BUM Desa Sinar Mulya, dan BUM Desa Srikandi. Sedang wisata lainnya yaitu: BUM Desa Abadi Kradinan, BUM Desa Berkah Kamardikan, BUM Desa Tunggul Sayekti, BUM Desa Cakra Usaha, BUM Desa Sari Mulyo, BUM Desa Sukses Abadi, BUM Desa Maju Mapan Ngubalan, BUM Desa Sumber Mulyo, BUM Desa Maju Jaya, BUM Desa Lentera Harapan, BUM Desa Gadung Melati, BUM Desa Sumbermulyo dan BUM Desa Gayuh Sandang Pangan.

Fitur Dagangan Pawon

Pasar Deso Online menampilkan fitur Dagangan Pawon sebanyak 16 diantaranya:



Gambar 7.21

Dagangan Pawon pada Pasar deso Tulungagung

Sumber: Dinas PMD Tulungagung

Dagangan pawon yang ditawarkan pada pasar deso Tulungagung sebagaimana Gambar 7.21 antara lain BUM Desa Larasati, BUM Desa Sinar Mulya, dan BUM Desa Srikandi. Sedang wisata lainnya yaitu: BUM Desa Abadi Kradinan, BUM Desa Berkah Kamardikan, BUM Desa Tunggul Sayekti, BUM Desa Cakra Usaha, BUM Desa Sari Mulyo, BUM Desa Sukses Abadi, BUM Desa Maju Mapan Ngubalan, BUM Desa Sumber Mulyo, BUM Desa Maju Jaya, BUM Desa Lentera Harapan, BUM Desa Gadung Melati, BUM Desa Sumbermulyo dan BUM Desa Gayuh Sandang Pangan.

Potret pasar deso terlihat belum semua toko terisi. Hal itu tergantung pada kesiapan masyarakat dalam menerima digitalisasi, kurangnya pengetahuan tentang digitalisasi. (Aini & Ikhwan, 2020) Dinas PMD seperti dalam komitmennya akan terus memberikan pelatihan-pelatihan agar BUM Desa mampu mengisi toko online dengan produk-produk yang dimiliki.

D. Peningkatan Ekonomi Desa dari pasar deso Tulungagung

Peningkatan ekonomi desa melalui pasar deso Tulungagung menjadi impian semua pihak termasuk Dinas PMD Tulungagung. Pasar deso mampu menyampaikan informasi produk yang dijual oleh BUM Desa maupun BUM Desa yang merupakan produk masyarakat desa. Kemampuan masyarakat akses elektrifikasi, penggunaan internet merupakan bagian indicator pencapaian ekonomi. (Setianingtias et al., 2019) Masyarakat didorong untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan (dari sisi konsumen) dan upaya memasarkan produk (sisi masyarakat sebagai produsen). Mengingat bahwa mayoritas masyarakat mampu bertahan pada situasi apapun karena akses produksi yang terus berjalan. Maka diperlukan saluran pemasaran yang memadai.

Pengunjung

Pengunjung pasar deso online secara umum dapat dilihat dari bintang yang telah dibubuhkan konsumen pada masing-masing produk. Semakin banyak bintang yang diberikan konsumen, maka konsumen yang telah bertransaksi memberikan penilaian sehingga produk akan ditingkatkan atau dipertahankan. Menurut Joko Ibrahim (BUM Desa Ngudi Sejahtera Ngunut), respon pengunjung belum terlalu besar terhadap barang yang dipasarkan di pasar Deso online, hal itu masih dalam proses pemasaran lebih lanjut untuk mengenalkan pasar online tersebut kepada warga masyarakatnya.

Tranksaksi

Semakin banyak masyarakat yang membuka akun pasar deso Tulungagung, maka diharapkan konsumen akan melakukan transaksi untuk membeli produk yang ditawarkan dan disediakan pada pasar deso Tulungagung. Pasar online sebagai bagian dari teknologi yang bergerak sangat cepat, menyebabkan perubahan perilaku konsumen dalam memilih dan melakukan transaksi jual beli. Edukasi terhadap masyarakat perlu ditingkatkan, karena untuk generasi millennial lebih siap dibandingkan generasi tua.

Untung dan rugi

Suatu keniscayaan, bahwa bisnis adalah menguntungkan. Namun bisnis yang tidak merugi juga bagian dari strategi bertahan bagi pebisnis. Untung rugi masih belum bisa dirasakan oleh BUM Desa atas pasar deso online karena masih diperlukan strategi berkelanjutan kepada masyarakat untuk masuk akun pasar deso. (Joko Ibrahim, BUM Desa Ngudi Sejahtera Ngunut)

E. Analisis peningkatan ekonomi Desa dan tindak lanjut

Guna peningkatan fungsi dan akses masyarakat terhadap pasar deso Tulungagung, maka dinas PMD Tulungagung melakukan pengembangan dengan melakukan bimtek lagi yang baru kita tawarkan pada BUM Desa lain. Agar dari 45 meningkat lebih banyak lagi. Strategi yg dilakukan dinas, Sosialisasi ke desa-desa. Untuk mensejajarkan dengan *market place* umum terkendala oleh mekanisme kerjasama dengan domain kominfo. Target pengembangan fitur untuk bisa bersaing dengan *market place* lain yang sudah unggul di pasar digital.

Upaya untuk meningkatkan respon konsumen masuk pasar online maka diperlukan strategi pelatihan kepada pemasar digital berbasis e-commerce, penguatan motivasi usaha agar usaha online terus berjalan.(Hapsoro et al., 2019) Pemasar tidak saja memasang produk pada online semata, melainkan bagaimana layanan online terus dikunjungi oleh

konsumen. Misalnya dengan konten yang menarik, diskon hingga produk yang berkualitas. Produk yang dihasilkan oleh masyarakat langsung tentunya memiliki daya saing lebih besar karena langsung ke produsen, sehingga biaya tidak mendorong harga yang terjangkau oleh konsumen.

F. Daftar Pustaka

- Aini, J. W., & Ikhwan, I. (2020). Kesiapan Masyarakat dalam Mengaplikasikan Destinasi Digital Pasar Van Der Capellen Batusangkar. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3(4), 712-722. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v3i4.358>
- Ayuni, Q., Cangara, H., & Arianto, A. (2019). The Influence of Digital Media Use on Sales Level of Culinary Package Product Among Female Entrepreneur. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(2), 129-141. <https://doi.org/10.33299/jpkop.23.2.2382>
- Hapsoro, B. B., Palupiningdyah, & Slamet, A. (2019). Peran Digital Marketing sebagai Upaya Peningkatan Omset Penjualan Bagi Klaster UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 23(2), 117-120. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/17880/8902>
- Pramudita, A. S. (2019). Pengaruh Insight Media Sosial Instagram Terhadap Penjualan Produk Online. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 10(April 2019), 1-14. <https://doi.org/10.34010/jurisma.v10i1.2264>
- Setianingtiyas, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(2), 61-74. <https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-74>

BAB VIII

ANALISIS PEMBERDAYAAN SEKTOR WISATA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA

A. Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor usaha yang akhir-akhir ini sangat diminati keberadaannya oleh masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap sektor pariwisata, didorong oleh keberadaan media sosial yang hampir semua masyarakat saat ini memilikinya. Masyarakat seolah berlomba-lomba mengunjungi berbagai tempat wisata untuk berfoto ria dan mengunggah fotonya di berbagai platform media sosial, seperti instagram, facebook, whatsapp, twitter, dan sebagainya. Budaya pamer foto/video di media sosial seperti inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong tingginya minat masyarakat terhadap berbagai tempat wisata (Habib & Mahyuddin, 2021).

Faktor lain yang menjadi pendorong tingginya minat masyarakat terhadap dunia hiburan, termasuk pariwisata, adalah meningkatnya tingkat stres masyarakat akibat padatnya aktifitas, kejenuhan, dan tingginya tuntutan hidup masyarakat di era modern seperti sekarang ini. Masyarakat dari berbagai kalangan ingin mendapatkan hiburan dan ketenangan (istilah populernya *refreshing*), dengan mengunjungi berbagai tempat wisata bersama pasangan, teman, maupun keluarga. Kondisi seperti inilah yang kerap kali membuat berbagai tempat wisata ramai dikunjungi oleh masyarakat khususnya di akhir pekan dan di hari-hari libur nasional (Mubarak & Aqli, 2021).

Tingginya minat masyarakat terhadap sektor pariwisata tersebut, menjadi peluang tersendiri bagi BUM Desa yang

memiliki kekayaan Sumber Daya Alam untuk dikembangkan menjadi tempat wisata. Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten yang memiliki wilayah dengan berbagai bentuk bentang alam yang bagus dan bisa dikembangkan menjadi tempat wisata. Bentang alam tersebut mulai dari pantai, pegunungan, air terjun, sungai, waduk, tebing, bukit, persawahan, sumber mata air, dan hutan (Zain & Taufik, 2020). Berbagai kekayaan bentang alam yang indah tersebut, sangat potensial untuk dikembangkan menjadi tempat wisata dan dikelola oleh BUM Desa setempat.

B. Sektor Wisata Desa

Berangkat dari realitas yang telah dijelaskan dalam pendahuluan di atas, Dinas PMD Kabupaten Tulungagung berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa. Saat ini tercatat sudah ada 16 BUM Desa yang menjadikan sektor pariwisata sebagai unit usahanya. BUM Desa tersebut diantaranya adalah BUM Desa Larasati, BUM Desa Sinar Mulya, BUM Desa Lentera Harapan, BUM Desa Karya Nyata, BUM Desa Abadi Kradinan, BUM Desa Srikandi, BUM Desa Berkah Kamardikan, BUM Desa Tunggul Sayekti, BUM Desa Cakra Usaha, BUM Desa Sari Mulyo, BUM Desa Sukses Abadi, BUM Desa Maju Mapan Ngubalan, BUM Desa Sumber Mulyo, BUM Desa Maju Jaya, BUM Desa Gadung Melati, dan BUM Desa Gayuh Sandang Pangan (Dinas PMD Kab. Tulungagung, 2020). Berikut akan diuraikan beberapa BUM Desa di Kabupaten Tulungagung yang bergerak di sektor pariwisata.

1. BUM Desa Larasati

BUM Desa Larasati merupakan BUM Desa yang terletak di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. BUM Desa ini mengelola sektor pariwisata bernama Nangkula Park. Nangkula Park merupakan sebuah taman bunga *Celosia* yang sangat indah, asri dan juga ramah anak. Di taman bunga ini tersedia aneka spot foto gratis, fasilitas *meeting room*, *restaurant*, tempat

karaoke, dan kolam ikan hias koi dengan perahu berbentuk bebek yang bisa dinaiki oleh pengunjung. *Crew* yang bertugas di Nangkula Park ini juga ramah dan siap melayani kebutuhan pengunjung setiap harinya. Di tempat ini pengunjung juga bisa membeli aneka oleh-oleh yang merupakan produk unggulan BUM Desa Larasati seperti ciplukan (*golden berry lokal*), cobek kayu asli, daun jeruk purut, kacang sembunyi, keripik usus *homemade*, kripik kulit patin, madu mongso, nugget ikan lele, nugget & tahu bakso, serta pangsit abon. Produk-produk tersebut dijual dengan harga yang relative murah dengan kualitas yang bagus.



Gambar 8.1. Nangkula Park

2. BUM Desa Sinar Mulya

BUM Desa Sinar Mulya merupakan BUM Desa yang terletak di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. BUM Desa ini mengelola sektor pariwisata bernama Agro Wisata Kahayangan. Agro Wisata Kahayangan menawarkan tempat wisata berupa taman hidroponik, kampung anggrek, dan *selfie corner*. Tempat ini sangat cocok untuk bersantai, melepas penat, dan berfoto ria bersama keluarga atau kawan. Di Agro Wisata Kahayangan juga terdapat rumah makan yang

menawarkan menu hidangan berupa aneka jus buah tropis, dendeng rebung, fuyunghai lokal, mie koyah, nila goreng /bakar, salad buah segar, soup buah, susu sapi segar, dan *sweet red velvet* yang merupakan minuman kekinian.



Gambar 8.2. Agro Wisata Kahayangan

3. BUM Desa Lentera Harapan

BUM Desa Lentera Harapan merupakan BUM Desa yang terletak di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. BUM Desa ini mengelola sektor pariwisata bernama Agrowisata Belimbing Organik Njegong Park. Sesuai dengan namanya, di agrowisata ini sebenarnya merupakan kebun blimbing yang dirawat secara organik. Agrowisata Belimbing Organik Njegong Park menawarkan wisata keluarga dengan keindahan alam dan kuliner. Di sini pengunjung bisa berfoto-fot ria dengan *background* taman dan beberapa miniatur *land mark* seperti menara Eiffel. Tempat wisata ini buka setiap hari, dan khusus hari minggu terdapat pasar makanan tradisonal. Adapun produk unggulan BUM Desa yang bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini adalah kripik pisang.



Gambar 8.3. Agrowisata Belimbing Organik Njegong Park

4. BUM Desa Karya Nyata

BUM Desa Karya Nyata merupakan BUM Desa yang terletak di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. BUM Desa ini mengelola sektor pariwisata berupa pantai yaitu Pantai Klatak. Sebenarnya BUM Desa ini mengelola 2 pantai sekaligus yaitu Pantai Klatak dan Pantai Gemah. Akan tetapi pengembangan Pantai Gemah difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung, sementara itu Pantai Klatak difasilitasi oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian dalam tulisan ini akan lebih fokus mengkaji Pantai Klatak yang difasilitasi oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung. Walaupun Pantai Klatak ini termasuk salah satu pantai yang baru dibuka untuk umum, namun pengunjungnya

sudah banyak, karena pantai ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Keistimewaan tersebut yaitu pantai ini masih sangat asri dan alami, pasirnya berwarna hitam mengkilat. Di tepi pantai banyak batu karang yang bervariasi bentuk dan ukurannya (ada yang melebar dan menjulang), sehingga mampu menunjukkan keindahannya dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pengunjung untuk mengabadikan moment kunjungannya ke pantai ini.



Gambar 8.4. Pantai Klatak

5. BUM Desa Abadi Kradinan

BUM Desa Abadi Kradinan merupakan BUM Desa yang terletak di Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. BUM Desa ini mengelola sektor pariwisata bernama Bukit Tunggul Manik. Sesuai dengan namanya, Bukit Tunggul Manik merupakan sebuah bukit dengan pemandangan yang sangat indah. Suasana di tempat wisata ini sangat sejuk, asri, dan hijau. Selain menyuguhkan pemandangan yang indah, di tempat ini juga menawarkan wisata kuliner dengan aneka ragam makanan dan minuman. Setidaknya ada 11 warung yang dikelola oleh masyarakat setempat. Tempat wisata ini tidak hanya buka di siang hari, namun juga di malam hari. Pada malam hari, Bukit Tunggul Manik

menyuguhkan pemandangan yang sangat indah berupa lampu-lampu dari Kota Tulungagung yang terlihat seperti bintang-bintang, ditambah dengan udaranya segar pegunungan yang menenangkan. Tidak heran jika malam hari pun tempat wisata ini tetap ramai dikunjungi oleh wisatawan.



Gambar 8.5. Bukit Tunggul Manik

C. Bentuk Pemberdayaan Dinas PMD

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tulungagung untuk BUM Desa yang bergerak di bidang Pariwisata diantaranya adalah melakukan pembinaan terhadap manajemen pengelolaan wisata agar berjalan dengan baik. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan seperti menyelenggarakan *workshop*, berupa pelatihan manajemen pengelolaan keuangan, manajemen pengelolaan administrasi, manajemen pemasaran, manajemen pengembangan dan pemeliharaan tempat wisata, serta manajemen sumber daya manusia sebagai pengelola wisata.

Selain manajemen pengelolaan, mulai tahun 2019, Dinas PMD Kabupaten Tulungagung juga melakukan penggalakan terhadap protokol kesehatan bagi para pengunjung dan pengelola BUM Desa. Hal ini sebagai refreksi dari adanya pandemi covid-19. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan pemantauan kepatuhan pengunjung dan

pengelola sektor wisata terhadap protokol kesehatan, sesuai dengan arahan dari pemerintah.

Dinas PMD Kabupaten Tulungagung juga memfasilitasi BUM Desa yang bergerak di bidang pariwisata dalam membangun jaringan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan. Bantuan yang sudah pernah diberikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat diantaranya adalah uang tunai dan pembangunan fasilitas penunjang wisata. Beberapa fasilitas yang sudah dibangun diantaranya adalah gazebo, stand-stand untuk berjualan oleh-oleh, toilet, dermaga, dan pos tempat pengelola.

Dinas PMD Kabupaten Tulungagung juga berupaya untuk mendorong pengelola pariwisata agar tetap memperhatikan kelestarian alam. Adapun upaya yang telah dilakukan dengan menghimbau pengelola agar menyediakan tempat sampah dan terus menjaga kebersihan lokasi dengan melakukan pembersihan secara berkala. Selain itu juga dengan memasang tulisan-tulisan ajakan kepada pengunjung agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Dinas PMD Kabupaten Tulungagung juga menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung untuk bersama-sama turut serta menjaga kebersihan lingkungan pariwisata di Kabupaten Tulungagung.

Selain fokus pada manajemen pengelolaan BUM Desa, Dinas PMD Kabupaten Tulungagung juga tidak melupakan masyarakat sekitar sebagai subjek yang perlu diberdayakan. Melalui berbagai pelatihan pembuatan produk-produk komersial, masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata diharapkan mampu menjual berbagai produk makanan maupun pernak-pernik. Produk makanan dan pernak-pernik tersebut, selain menambah daya tarik tempat wisata, tentu saja juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Bentuk dukungan nyata yang sudah pernah dilakukan diantaranya dengan mengadakan pelatihan pengolahan produk makanan berbahan baku ikan laut menjadi naget, bakso ikan, stik ikan,

dan gulai ikan. Selain itu juga dibangunnya stand-stand tempat masyarakat berjualan di sekitar tempat wisata.

Dinas PMD Kabupaten Tulungagung juga terus berupaya meningkatkan ketertiban administrasi pengelola BUM Desa dengan terus menagih laporan pertanggungjawaban. Ketertiban administrasi ini sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola terhadap seluruh aktifitas BUM Desa termasuk penggunaan dana. Dengan adanya pelaporan administrasi yang jelas dan transparan, diharapkan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

D. Peningkatan Ekonomi Desa dari Sektor Wisata

Sektor wisata yang dikelola BUM Desa mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, maupun BUM Desa. Bentuk peningkatan ekonomi desa dapat dilihat dari usaha masyarakat mampu dijual pada kawasan wisata. Dagangan yang dijual diantaranya makanan olahan seperti nasi bantingan, tahu goreng, cilok, sempol, aneka minuman. Setiap pengunjung dipersyaratkan membayar tiket masuk dan membayar parkir (informan wisatawan). Seperti di wisata Nangkula park, disampaikan bapak Anang (Kades Kendalbulur) menyampaikan bahwa kebutuhan kantin untuk wisata di suplay oleh masyarakat, termasuk toko-toko yang dimiliki oleh masyarakat. Tenaga yang dimanfaatkan untuk pengembangan wisata juga dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan seni, diajak bergabung ke wisata desa Nangkula Park untuk mengembangkan wisata desa. Respon masyarakat sangat baik, karena dilibatkan dalam urusan kebutuhan bersama. Hasil observasi menunjukkan bahwa, dampak dari keterlibatan masyarakat, wisata ini menjad berkembang luas, pengunjung terdiri dari masyarakat desa setempat dan masyarakat Tulungagung dan sekitar.

E. Analisis Peningkatan Ekonomi Desa dan Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang bisa dilakukan dinas PMD Tulungagung untuk kedepan berupa pendampingan pengelolaan wisata, bagaimana memasarkan online, media social. Pelatihan pengelolaan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pengelolaan sampah. Administrasi dipisahkan. Ada gazebo-gazebo yang di kelola pokdarwis, sebagian lingkungan mempunyai gazebo bersama. Kita harapkan ada kerjasama dengan BUM Desa, mungkin sistem sewanya. Pengunjung yang masuk melalui tiket masuk, atau pakatnya juga. Kalau mengeluarkan tiket masuk atau parkir maka diperdeskan.

F. Daftar Pustaka

- Dinas PMD Kab. Tulungagung. (2020, Januari 1). *Paket Wisata*. Diambil kembali dari Pasar Deso: <https://pasardeso.tulungagung.go.id/paket-wisata/>
- Habib, M. A., & Mahyuddin. (2021). EVALUASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TPS 3R DI DESA WISATA RELIGI GUNUNGPRING KABUPATEN MAGELANG. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, I(1), 1-34.
- Mubarak, Z., & Aqli, W. (2021). PENERAPAN KONSEP ARSITEKTUR UNIVERSAL PADA PUSAT HIBURAN DUNIA FANTASI. *Jurnal Arsitektur PURWARUPA*, V(1), 9-14.
- Zain, M. M., & Taufik, M. (2020). *Pengembangan Potensi Wisata Alam Kabupaten Tulungagung dengan Sistem Informasi Geografis*. Surabaya: Digital Library Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan peran dinas PMD dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa melalui sinergi program daerah, propinsi dan pusat.
2. Bab II Kerangka Teoritis menjadikan konsep pemberdayaan masyarakat, Teori *Asset Based Community Development* (ABCD), teori stakeholders, Peningkatan ekonomi masyarakat, Tipologi desa dan kelurahan, Studi terdahulu, kerangka konseptual sebagai pijakan untuk penulisan
3. Bab III Metodologi, memanfaatkan Pendekatan dan jenis pemberdayaan, Lokasi Pemberdayaan, *Asset Based Community Development*, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data, Pengecekan keabsahan temuan agar buku ini memenuhi komponen karya tulis ilmiah
4. Bab IV Master Plan Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Tulungagung dengan 9 perencanaan yang telah dibuat dan dijalankan.
5. Bab V Pemberdayaan Sektor Usaha Masyarakat Desa melalui 6 kegiatan yang telah dilaksanakan mampu memberikan keahlian kepada kelompok masyarakat.
6. Bab VI Analisis Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dimana terdapat 65 BUM Desa masuk kategori maju dan sisanya dalam upaya mendorong untuk BUM Desa naik

kelas dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa

7. Bab VII. Analisis Pasar Deso Tulungagung telah menampilkan produk BUM Desa dengan 4 fitur yang ditawarkan yaitu produk unggulan, toko BUM Desa, dagangan pawon dan wisata desa. Pasar ini mampu menawarkan sejumlah produk BUM Desa sehingga ekonomi masyarakat mengalami perubahan secara meningkat.
8. Bab VIII. Analisis Pemberdayaan Sektor Wisata Desa yaitu sejumlah 16 BUM Desa. Hadirnya wisat desa mampu memutar usaha masyarakat pada kawasan wisata, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat

B. Saran dan Rekomendasi

Saran

Kegiatan dinas PMD memberikan manfaat bagi pengembangan Sumber Daya Manusia di desa, sehingga meningkatkan ekonomi desa. Maka seyogyanya didasarkan atas keberlanjutan program, agar terus memberikan manfaat, tidak hanya berhenti pada pelatihan.

Rekomendasi

Program yang telah dilaksanakan perlu dilakukan berdasarkan tingkat keperluan dan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam, bahan baku. Diperlukan evaluasi dan monitoring pasca kegiatan, sehingga memberi manfaat lebih luas kepada masyarakat dan *sustainable*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, J. W., & Ikhwan, I. (2020). Kesiapan Masyarakat dalam Mengaplikasikan Destinasi Digital Pasar Van Der Capellen Batusangkar. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3(4), 712-722. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v3i4.358>
- Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alhamuddin, Aziz, H., Inten, D. N., & Mulyani, D. (2020). Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development (ABCD) untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Madrasah di Era Industri 4.0. *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING*, IV(4), 321-331.
- Anharudin, Fernando, D., Saefudin, Susandi, D., & Dwiyatno, S. (2019). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Keterampilan Membuat Nugget Berbahan Dasar Ikan Bandeng Sebagai Bahan Pangan Lokal. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, XIX(2), 141-149.
- Arnani, M. (2021, Februari 18). *Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi* . Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>
- Astuti, A., Roektingrum, E., & Hasanah, H. (2011). Optimalisasi Potensi Peternak Susu Sapi Perah Melalui Penyuluhan Dan Pelatihan Pembuatan Keju Dan Yoghurt Aneka Rasa Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Inotek*, 15(2), 146-154.

- Ayuni, Q., Cangara, H., & Arianto, A. (2019). The Influence of Digital Media Use on Sales Level of Culinary Package Product Among Female Entrepreneur. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(2), 129–141. <https://doi.org/10.33299/jpkop.23.2.2382>
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri : FAM Publishing .
- Bappeda Kab Tulungagung. (2018, Mei 10). *Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*. Retrieved from Bappeda Kabupaten Tulungagung: <http://bappeda.tulungagung.go.id/detailpost/koordinasi-penanggulangan-kemiskinan#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Sosial%20tahun,turun%20menjadi%208%2C04%25>.
- BPS Kab Tulungagung. (2020, Maret 9). *Jumlah Desa Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung 2015-2019*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung: <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2020/03/09/5099/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulungagung-2015-2019.html>
- Creswel, J. W. (2017). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Despica, R. (2018). TIPOLOGI DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN. *Jurnal Spasial*, III(5), 39-43.
- Dinas PMD Kab. Tulungagung. (2020, Januari 1). *Paket Wisata*. Diambil kembali dari Pasar Deso: <https://pasardeso.tulungagung.go.id/paket-wisata/>
- DPR RI. (2014, January 15). *UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. Diambil kembali dari Website Resmi DPR RI :

https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf

- Dureau, C. (2017). *Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan*. <https://docplayer.info/39269917-Australian-community-development-and-civil-society-strengthening-scheme-access-tahap-ii.html>
- Edi Yusuf Agunggunanto, d. (2016, Maret 1). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) . *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara* , 68. Diambil kembali dari e-journal Universitas Diponegoro Semarang: <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395/753>
- Fithriyana, E. (2020). Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, I(2)*, 1–9.
- Fitri, N., Sulistyarini, R. I., & Windarti, Y. (2020). Pemberdayaan Perempuan/Ibu Tunggal Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Industri Rumah Tangga Halal Dan Sehat Sebagai Usaha Peningkatan Self Efikasi Diri Dalam Berwirausaha. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art4>
- Fitria. (2020). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES). *Adl Islamic Economic, I(1)*, 13-28.
- Fitriawan, F. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Budidaya Jamur Tiram. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement, I(1)*, 47–58.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: CV. Dream Litera Buana.

- Habib, M. A., & Mahyuddin. (2021). EVALUASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TPS 3R DI DESA WISATA RELIGI GUNUNGPRING KABUPATEN MAGELANG. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, I(1), 1-34.
- Habib, M. A., & Mahyuddin. (2021). EVALUASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TPS 3R DI DESA WISATA RELIGI GUNUNGPRING KABUPATEN MAGELANG. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, I(1), 1-34.
- Hamid, H. (2018). *MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Makassar: De La Macca.
- Hapsoro, B. B., Palupiningdyah, & Slamet, A. (2019). Peran Digital Marketing sebagai Upaya Peningkatan Omset Penjualan Bagi Kluster UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 23(2), 117-120. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/17880/8902>
- Harahap, I. S. (2018). Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, II(2), 101-115.
- Kompas, (2021, Februari 18). *Kompas.com* . Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>
- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Mathie, A., Cameron, J., & Gibson, K. (2017). Asset - based and Citizen - led development: Using a Diffracted Power

- Lens to Analyze the Possibilities and Challenges. *Progress in Development Studies*, 17(1), 54–66.
- Maulana, M. (2019). ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, IV(2), 259-278.
- Mubarak, Z., & Aqli, W. (2021). PENERAPAN KONSEP ARSITEKTUR UNIVERSAL PADA PUSAT HIBURAN DUNIA FANTASI. *Jurnal Arsitektur PURWARUPA*, V(1), 9-14.
- Muthuri, J. N., Moon, J., & Idemudia, U. (2012). Corporate Innovation and Sustainable Community Development in Developing Countries. *Business & Society*, 51(3), 355–381. <https://doi.org/10.1177/0007650312446441>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur, M., & Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Nominal*, I(1), 24.
- Poerwadarminta, W. (1999). *Kamus umum bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka .
- Ponelis, S. R. (2015). Using Interpretive Qualitative Case Studies for Exploratory Research in Doctoral Studies: A Case of Information Systems Research in Small and Medium Enterprises. *International Journal of Doctoral Studies*, 10, 535–550. <https://doi.org/10.28945/2339>
- Pramudita, A. S. (2019). Pengaruh Insight Media Sosial Instagram Terhadap Penjualan Produk Online. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 10(April 2019), 1–14. <https://doi.org/10.34010/jurisma.v10i1.2264>
- Purnamasari, S. D. (2020). Muhammad Farid Ma'ruf. *Publika*, VIII(5), 1-12.
- Puspitasari, D. N., Warsono, H., & DM, I. H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDesa

- Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, II(1), 70-83.
- Putra, D. E., & Ismail, A. M. (2016). Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Sari Buah Jesika (Jeruk Siam Kancil) di Dusun Banjarejo RT 02 RW 08 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dana BOPTN Tahun 2016*, 207-210.
- Rahman, N. E. (2018). Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo. *Jurnal PKS*, VII(3), 208.
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Bandung Barat . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Universitas Gunadarma* , 3.
- RI, D. R. (2004). *UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah* . Diambil kembali dari <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf>
- Ridawati, & Alsihendra. (2021). Pelatihan Pembuatan Minuman Serbuk Kunyit Asam Bagi Masyarakat Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik*, 1(1), 71-85. <https://doi.org/doi.org/10.21009/ABDITEK.011.07>
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa . *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung* , 426 .
- Riwayati, I., Hartati, I., & Harianingsih, H. (2018). Pelatihan Pembuatan Keju Lunak Alami Dan Produk Olahannya Bagi Peternak Sapi Di Desa Pengging Kecamatan Banyudono Boyolali. *Abdimas Unwahas*, 3(2), 26-29. <https://doi.org/10.31942/abd.v3i2.2499>

- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, III(1), 115-126.
- Rosyidi, S. (2004). *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, C., Wijayanto, D., & Pramudito, P. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan “ Cream cheese “ Berbahan dasar Santan Sebagai Substitusi. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 2(1), 49-54.
- Salman, D. (2012). Manajemen Perencanaan berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi serta Peran Fasilitator. Makassar: Sulawesi Capacity Development Project KerjasamaKemendagri dan JICA. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sayifullah, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten . *JEQu Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* , 236.
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(2), 61-74. <https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-74>
- Soekanto, S. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofiani, V., Saepuloh, L., & Eriswanto, E. (2017). PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA KARANGJAYA KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN SUKABUMI. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers “Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V”*. VII, hal. 1-7. Purwokerto:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Jenderal Soedirman.

- Sosial, D. K. (2020, Desember 7). *Profil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* . Retrieved from Data Terpadu Kesejahteraan Sosial : <https://dtks.kemensos.go.id/sejarah-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks>
- Suardi, Mallongi, S., & Baharuddin, D. (2019). Model Pembangunan Pertanian Melalui Penerapan Agropolitan Berbasis Partisipasi di Kabupaten Pinrang dengan Pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). *PARADOKS : JURNAL ILMU EKONOMI, II(4)*, 48-61.
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyanto, Y., Sustiyah, S., Zubaidah, S., & Satata, B. (2016). Pemanfaatan Kotoran Sapi Sebagai Sumber Biogas Rumah Tangga di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Udayana Mengabdikan, 15(2)*, 150-158.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tulungagung, D. (2019). *DPMD Tulungagung* . Retrieved from DPMD Tulungagung : <http://dpmd.tulungagung.go.id/profil/>
- Usman, U., Hasan, H., M, M. H., & Elihami, K. (2020). Pemanfaatan Kotoran Ternak Sebagai Bahan Pembuatan Biogas. *Maspul Journal Of Community Empowerment, 1(1)*, 13-20.
- Wahyu, Golar, & Massiri, S. D. (2019). ANALISIS KEPENTINGAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI HUTAN DESA NAMO KECAMATAN KULAWI. *JURNAL FORESTSAINS, XVI(2)*, 105 - 116.

- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, XII*(1), 17.
- Wrihatnolo, R. R. (2007). Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan. Makassar: Desertasi Universitas Hasanuddin
- Zain, M. M., & Taufik, M. (2020). *Pengembangan Potensi Wisata Alam Kabupaten Tulungagung dengan Sistem Informasi Geografis*. Surabaya: Digital Library Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta . *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, UNPAD Bandung*